

Katalog : 4102002.1217

# ANALISIS SITUASI PEMBANGUNAN MANUSIA

KABUPATEN SAMOSIR  
2017



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN SAMOSIR**

# ANALISIS SITUASI PEMBANGUNAN MANUSIA

KABUPATEN SAMOSIR  
2017

<https://samosirkab.bps.go.id>



# **ANALISIS SITUASI PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN SAMOSIR 2017**

**ISBN** : 978-602-6860-33-0  
**Katalog** : 4102002.1217  
**No. Publikasi** : 12170.1819  
**Ukuran Buku** : 14,8 cm x 21 cm  
**Jumlah halaman** : xii + 78 halaman

**Naskah:**

Badan Pusat Statistik Kabupaten Samosir

**Penyunting Naskah:**

Badan Pusat Statistik Kabupaten Samosir

**Desain Kover oleh:**

Badan Pusat Statistik Kabupaten Samosir

**Penerbit :**

©Badan Pusat Statistik Kabupaten Samosir

**Pencetak :**

CV. Rilis Grafika

*“Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau  
Menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil  
Tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik”*

## KATA PENGANTAR

Publikasi Analisis Situasi Pembangunan Manusia (ASPM) Kabupaten Samosir tahun 2017 menyajikan informasi dan analisis situasi pembangunan manusia ditinjau dari aspek pendidikan (Harapan lama sekolah dan Rata-rata lama sekolah), kesehatan (Angka harapan hidup), daya beli masyarakat, dan hubungan antara IPM dengan tingkat perekonomian Kabupaten Samosir.

Publikasi ini tidak hanya menggambarkan kondisi tahun 2017 saja, namun juga dibandingkan dari kondisi tahun 2013, sehingga dapat melihat perkembangan pembangunan manusia selama periode 2013-2017. Informasi dan analisis data, grafik, tabel perkembangan pencapaian IPM di Kabupaten Samosir beserta komponen-komponennya selama tahun 2013-2017 secara sederhana sehingga diharapkan dapat dipahami dengan mudah oleh pengguna data.

Diharapkan dengan terbitnya publikasi ini maka kebutuhan ketersediaan data khususnya data pembangunan manusia dapat dipenuhi dengan baik. Kepada semua pihak yang telah membantu untuk terwujudnya publikasi ini, baik langsung maupun tidak langsung diucapkan terima kasih.

Pangururan, Desember 2018  
Badan Pusat Statistik  
Kabupaten Samosir  
Kepala,



Ir. Rudy Harlon Harianja  
NIP. 19660324199203 1 003



# DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Definisi Pembangunan Manusia.....	3
1.2 Mengukur Pembangunan Manusia.....	4
1.3 Manfaat Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	5
1.4 Maksud dan Tujuan.....	6
<b>BAB 2 INOVASI DALAM PENGUKURAN PEMBANGUNAN MANUSIA</b>	<b>7</b>
2.1. Perjalanan Penghitungan IPM.....	9
2.2 Perubahan Metodologi IPM.....	12
<b>BAB 3 METODE PENGHITUNGAN IPM.....</b>	<b>19</b>
3.1 Komponen IPM.....	21
3.1.1. Angka Harapan Hidup Saat Lahir.....	21
3.1.2. Tingkat Pendidikan.....	22
3.1.3. Standar Hidup Layak.....	24
3.2 Penyusunan IPM.....	26
3.3 Klasifikasi Pembangunan Manusia.....	29
<b>BAB 4 KONDISI UMUM KABUPATEN SAMOSIR.....</b>	<b>31</b>
4.1 Letak Geografis.....	33
4.2 Kependudukan.....	34
4.2.1. Jumlah dan Persebaran Penduduk.....	35
4.2.2. Komposisi Umur.....	37
4.3 Tingkat Pendidikan.....	39

4.3.1. Angka Partisipasi Sekolah.....	39
4.3.2. Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan.....	41
4.4 Tingkat Kesehatan.....	43
4.4.1. Penyediaan Sarana Kesehatan.....	43
4.4.2. Tenaga Kesehatan Penolong Kelahiran.....	44
4.5 Perekonomian.....	45
<b>BAB 5 POSISI PEMBANGUNAN MANUSIA.....</b>	<b>49</b>
5.1 Komponen Indeks Pembangunan Manusia.....	51
5.1.1. Angka Harapan Hidup Kabupaten Samosir.....	51
5.1.2. Indeks Pengetahuan Kabupaten Samosir.....	53
5.1.2.1. Harapan Lama Sekolah (HLS).....	54
5.1.2.2. Rata - rata Lama Sekolah (RLS).....	55
5.1.3. Indeks Daya Beli.....	58
5.2 Klasifikasi Capaian IPM.....	60
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>65</b>

## DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1. Simulasi Rata-rata Aritmatik dan Rata-rata Geometrik	13
Tabel 2.2. Perbedaan Indikator Metode Lama dan Metode Baru UNDP.....	15
Tabel 3.1. Komoditi Kebutuhan Pokok sebagai Dasar Penghitungan Daya Beli (PPP).....	25
Tabel 3.2. Nilai Maksimum dan Minimum dari Setiap Komponen IPM.....	27
Tabel 4.1. Banyaknya Penduduk di Kabupaten Samosir Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin Tahun 2017.....	37
Tabel 4.2. Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten Samosir, Menurut Kecamatan Tahun 2017.....	43
Tabel 5.1. Tingkatan Capaian IPM Metode Baru.....	61
Tabel 5.2. Komponen IPM dan Status Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Samosir dan Sumatera Utara Tahun 2017.....	63

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Hal</b>
Gambar 2.1 Perjalanan Metodologi Penghitungan IPM di UNDP.....	11
Gambar 2.2 Perbandingan IPM Metode Lama & Metode Baru	17
Gambar 3.1 Klasifikasi Pencapaian IPM.....	29
Gambar 4.1 Persentase Penduduk per Kecamatan Kabupaten Samsir Tahun 2017.....	36
Gambar 4.2 Komposisi Penduduk Kabupaten Samsir Menurut Kelompok Umur Tahun 2013-2017.....	38
Gambar 4.3 Persentase Penduduk Kabupaten Samsir dan Sumatera Utara Yang Masih Sekolah menurut Kelompok Umur Tahun 2017.....	40
Gambar 4.4 Tingkat Pendidikan tertinggi yang ditamatkan Penduduk Kabupaten Samsir usia 10 tahun ke atas Tahun 2017.....	42
Gambar 4.5 Persentase Balita Menurut Penolong Kelahiran Pertama, 2017.....	44
Gambar 4.6 Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Samsir Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2017.....	46
Gambar 4.7 Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Samsir dan Provinsi Sumatera Utara ADH Konstan 2010, Tahun 2013 – 2017.....	47

Gambar 4.8	Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Samosir Tahun 2013-2017.....	48
Gambar 5.1	Angka Harapan Hidup Kabupaten Samosir dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 – 2017.....	53
Gambar 5.2	Harapan Lama Sekolah Kabupaten Samosir dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2017.....	55
Gambar 5.3	Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Samosir dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2017 .....	56
Gambar 5.4	Persentase Penduduk Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Kabupaten Samosir, Tahun 2017.....	57
Gambar 5.5	Tingkat Daya Beli Penduduk Samosir dan Sumatera Utara Tahun 2013-2017 (000 Rp).....	60
Gambar 5.6	IPM Kabupaten Samosir dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2017.....	62

## DAFTAR LAMPIRAN

	<b>Hal</b>
Lampiran 6.1. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan 2017.....	67
Lampiran 6.2. Jumlah Penduduk, Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan 2017.....	68
Lampiran 6.3. Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin 2017.....	69
Lampiran 6.4. Persentase Penduduk Kabupaten Samosir Berusia 10 Tahun Ke Atas Menurut Partisipasi Sekolah dan Jenis Kelamin 2017.....	70
Lampiran 6.5. Angka Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Utara 2013-2017.....	71
Lampiran 6.6. Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Utara 2013-2017.....	72
Lampiran 6.7. Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Menurut Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Utara 2013-2017.....	73
Lampiran 6.8. Pengeluaran Riil Per Kapita Yang Disesuaikan Menurut Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Utara 2013-2017.....	74
Lampiran 6.9. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota Di Propinsi Sumatera Utara 2013-2017.....	75

Lampiran 6.10. Peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Sumatera Utara secara Nasional dan Propinsi Sumatera Utara 2013-2017..... 76

<https://samosirkab.bps.go.id>



BAB

1

# PENDAHULUAN

<https://sircab.bps.go.id>



# PENDAHULUAN

# 1

## 1.1 DEFINISI PEMBANGUNAN MANUSIA

Konsep pembangunan manusia pada dasarnya mencakup dimensi pembangunan yang sangat luas. Lebih luas dari definisi pembangunan yang hanya menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi. Menurut *United Nation Development Programme* (UNDP), pembangunan manusia salah satunya berupa proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia (*"aprocess of enlarging people's choices"*). Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan dianalisis serta dipahami dari sudut manusianya, bukan hanya dari pertumbuhan ekonominya.

Pada prinsipnya, pilihan manusia sangat banyak jumlahnya, beraneka ragam dan berubah setiap saat. Namun demikian, terdapat tiga pilihan yang paling mendasar, yaitu berumur panjang dan hidup sehat, memperoleh pendidikan dan memiliki akses terhadap sumber - sumber kebutuhan agar hidup secara layak. Selain tiga pilihan dasar tersebut, juga terdapat pilihan lainnya atau pilihan tambahan. Pilihan tambahan, mulai dari politik, kebebasan ekonomi dan sosial sehingga memiliki peluang untuk menjadi kreatif dan produktif, serta menikmati harga diri pribadi dan jaminan hak asasi manusia.

## 1.2 MENGUKUR PEMBANGUNAN MANUSIA

Keberhasilan pembangunan diukur dengan beberapa parameter, salah satunya adalah pembangunan manusia. Sistem pengukuran dan monitoring pembangunan manusia mencakup variabel inti dengan tujuan utama untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif. Variabel tersebut menerangkan sebagian besar data/ indikator yang menjadi perhatian penting dalam pengukuran pembangunan manusia.

Pengukuran pembangunan manusia pertama kali diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 yang disebut sebagai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Indeks (HDI)*. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM sebagai ukuran kualitas hidup dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi dasar, yaitu:

1. Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*) ;
2. Pengetahuan (*knowledge*); dan
3. Standar hidup layak (*decent standard of living*).

Berdasarkan tiga dimensi dasar tersebut, diperoleh turunan empat indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM yaitu angka harapan hidup saat lahir (AHH), rata – rata lama sekolah (RLS), harapan lama sekolah (HLS) dan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita.

### **1.3 MANFAAT INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)**

Indeks Pembangunan Manusia menjadi salah satu indikator yang penting dalam melihat sisi lain dari pembangunan. Manfaat penting IPM antara lain sebagai berikut :

- IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).
- IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.
- Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran umum dari pencapaian pembangunan dan penentuan prioritas yang ingin dicapai oleh suatu wilayah. Pencapaian pembangunan yang dimaksud adalah pembangunan yang berwawasan manusia yaitu pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusianya. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan Kabupaten Samosir yang salah satunya adalah terwujudnya masyarakat Samosir yang sejahtera, yang berorientasi pada pendidikan, kesehatan, rendahnya kemiskinan, menurunnya tingkat pengangguran, pendapatan per kapita yang layak dan lain - lain.

## 1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kabupaten Samosir 2017 bertujuan untuk melihat perkembangan pembangunan manusia di Kabupaten Samosir tahun 2013-2017 yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan manusia.

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan publikasi ini, yaitu :

- a. Menyajikan data dan informasi yang akurat, lengkap, dan terkini mengenai pembangunan manusia di Kabupaten Samosir yang dilengkapi dengan indikator-indikator relevan,
- b. Menyediakan data mengenai pembangunan manusia yang bermanfaat bagi pemerintah daerah umumnya dan pengguna data khususnya,
- c. Sebagai dasar perencanaan pada tingkat makro, terutama terkait dengan masalah pendidikan dan kesehatan masyarakat,
- d. Menyediakan informasi keterkaitan pembangunan manusia dengan dimensi pembangunan seperti pertumbuhan ekonomi,



**INOVASI DALAM  
PENGUKURAN  
PEMBANGUNAN MANUSIA**



# INOVASI DALAM PENGUKURAN PEMBANGUNAN MANUSIA

## 2

### 2.1 PERJALANAN PENGHITUNGAN IPM

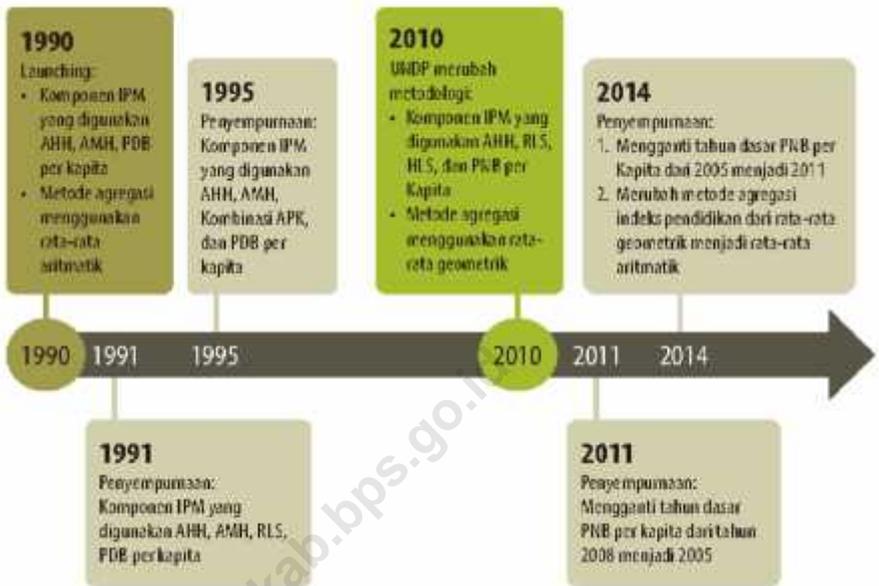
Sejak pertama kali diperkenalkan oleh UNDP, IPM terus mendapat banyak sorotan. Banyak dukungan yang mengalir, tetapi tidak sedikit kritikan terhadap indikator ini. Sebagian pihak berpendapat bahwa indikator yang tercakup di dalam IPM kurang mewakili pembangunan. Para pakar terus bekerja untuk mendalami lebih jauh tentang pembangunan manusia. Mereka terus melakukan kajian untuk menyempurnakan penghitungan IPM. Hal itu terutama dilakukan pada indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM. Tercatat bahwa UNDP melakukan dua kali penyempurnaan pada tahun 1991 dan 1995 dan perubahan di tahun 2010.

Awalnya, UNDP memperkenalkan suatu indeks komposit yang mampu mengukur pembangunan manusia. Ketika diperkenalkan pada tahun 1990, mereka menyebutnya sebagai Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*) yang kemudian secara rutin dipublikasikan setiap tahun dalam Laporan Pembangunan Manusia (*Human Development Report*). Kala itu, IPM dihitung melalui pendekatan dimensi umur panjang dan hidup sehat yang diproksi dengan angka harapan hidup saat lahir, dimensi pengetahuan yang diproksi dengan angka melek huruf dewasa, serta dimensi standar hidup layak yang diproksi dengan PDB per kapita. Untuk menghitung ketiga dimensi menjadi sebuah indeks komposit, digunakan rata-rata aritmatik.

Setahun berselang, UNDP melakukan penyempurnaan penghitungan IPM dengan menambahkan variabel rata-rata lama sekolah ke dalam dimensi pengetahuan. Akhirnya, terdapat dua indikator dalam dimensi pengetahuan yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Karena terdapat dua indikator dalam dimensi pengetahuan, UNDP memberi bobot untuk keduanya. Indikator angka melek huruf diberi bobot dua per tiga, sementara indikator rata-rata lama sekolah diberi bobot sepertiga. Hingga tahun 1994, keempat indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM masih cukup relevan. Namun akhirnya, pada tahun 1995 UNDP kembali melakukan penyempurnaan metode penghitungan IPM. Kali ini, UNDP mengganti variabel rata-rata lama sekolah menjadi gabungan angka partisipasi kasar. Pembobotan tetap dilakukan dengan metode yang sama seperti sebelumnya.

Pada tahun 2010, UNDP merubah metodologi penghitungan IPM. Kali ini perubahan drastis terjadi pada penghitungan IPM. UNDP menyebut perubahan yang dilakukan pada penghitungan IPM sebagai metode baru. Beberapa indikator diganti menjadi lebih relevan. Indikator Angka Partisipasi Kasar gabungan (*Combine Gross Enrollment Ratio*) diganti dengan indikator Harapan Lama Sekolah (*Expected Years of Schooling*). Indikator Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Selain itu, cara penghitungan juga ikut berubah. Metode rata-rata aritmatik diganti menjadi rata-rata geometrik untuk menghitung indeks komposit.

**Gambar 2.1**  
**Perjalanan Metodologi Penghitungan IPM di UNDP**



Catatan :

- |     |                                  |     |                           |
|-----|----------------------------------|-----|---------------------------|
| AHH | : Angka Harapan Hidup saat Lahir | APK | : Angka Partisipasi Kasar |
| AMH | : Angka Melek Huruf              | HLS | : Harapan Lama Sekolah    |
| RLS | : Rata-rata Lama Sekolah         | PNB | : Produk Nasional Bruto   |
| PDB | : Produk Domestik Bruto          |     |                           |

Perubahan yang dilakukan UNDP tidak hanya sebatas itu. Setahun kemudian, UNDP menyempurnakan penghitungan metode baru. UNDP merubah tahun dasar penghitungan PNB per kapita dari 2008 menjadi 2015. Tiga tahun berselang, UNDP melakukan penyempurnaan kembali penghitungan metode baru. Metode agregasi indeks pendidikan diubah dari rata-rata geometrik menjadi rata-rata aritmatik dan tahun dasar PNB per kapita. Serangkaian perubahan yang dilakukan UNDP bertujuan untuk membuat suatu indeks komposit yang cukup relevan dalam mengukur pembangunan manusia.

## 2.2 PERUBAHAN METODOLOGI IPM

Pada dasarnya, perubahan metodologi penghitungan IPM didasarkan pada alasan yang cukup rasional. Suatu indeks komposit harus mampu mengukur apa yang diukur. Dengan pemilihan metode dan variabel yang tepat, indeks yang dihasilkan akan cukup relevan. Alasan utama yang dijadikan dasar perubahan metodologi penghitungan IPM diperkuat oleh dua hal mendasar.

**Pertama**, beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka Melek Huruf (AMH) sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Sebelum penghitungan metode baru digunakan, AMH di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar wilayah dengan baik. Dalam konsep pembentukan indeks komposit, variabel yang tidak sensitif membedakan akan menyebabkan indikator komposit menjadi tidak relevan. Oleh karena itu, indikator AMH dianggap sudah tidak relevan sebagai komponen dalam penghitungan IPM.

Selanjutnya adalah indikator PDB per kapita. Indikator ini pada dasarnya merupakan proksi terhadap pendapatan masyarakat. Namun disadari bahwa PDB diciptakan dari seluruh faktor produksi dan apabila ada investasi dari asing turut diperhitungkan. Padahal, tidak seluruh pendapatan faktor produksi dinikmati penduduk lokal. Oleh karena itu, PDB per kapita kurang dapat menggambarkan pendapatan masyarakat atau bahkan kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah.

**Kedua**, penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain. Pada dasarnya, konsep yang diusung dalam pembangunan manusia adalah pemerataan pembangunan dan sangat anti terhadap ketimpangan pembangunan. Rata-rata aritmatik memungkinkan adanya transfer capaian dari dimensi dengan capaian tinggi ke dimensi dengan capaian rendah. Perumpamaan sederhana untuk dapat melihat kelemahan rata-rata aritmatik misalnya dengan menghitung secara sederhana nilai ketiga dimensi pembangunan manusia.

**Tabel 2.1**  
**Simulasi Rata-rata Aritmatik dan Rata-rata Geometrik**

Kesehatan	Pendidikan	Standar Hidup Layak	Rata-rata Aritmatik	Rata-rata Geometrik
3	3	3	3,00	3,00
2	3	4	3,00	2,88
1	3	5	3,00	2,47

Misal, capaian dimensi umur panjang dan sehat, dimensi pengetahuan, dan dimensi standar hidup masing-masing adalah 3, 3, dan 3. Dengan rata-rata aritmatik dapat diperoleh dengan mudah bahwa rata-rata ketiga dimensi adalah  $(3 + 3 + 3) / 3 = 3$ . Pada contoh kasus lain, misalkan capaian ketiga dimensi berturut-turut adalah 2, 3, dan 4. Rata-rata ketiga dimensi juga masih 3, yaitu  $(2 + 3 + 4) / 3 = 3$ . Padahal secara nyata terlihat bahwa ada ketimpangan capaian antar dimensi pembangunan manusia.

Pada kasus yang lebih ekstrim, rata-rata aritmatik mampu menutupi ketimpangan pembangunan manusia yang terjadi di suatu wilayah. Misal,

capaian ketiga dimensi secara berturut-turut menjadi 1, 3, dan 5. Dalam kondisi ketimpangan yang ekstrim ini, rata-rata pembangunan manusia tetap 3. Kondisi ini sama dengan capaian suatu wilayah pada contoh kasus pertama. Rata-rata aritmatik menyebabkan seolah-olah tidak terjadi ketimpangan karena hasil dapat ditutupi oleh dimensi yang lebih tinggi capaiannya. Kelemahan rata-rata aritmatik ini menjadi salah satu alasan mendasar untuk memperbarui metode penghitungan IPM.

UNDP memperkenalkan penghitungan IPM metode baru dengan beberapa perbedaan mendasar dibanding metode lama. Setidaknya, terdapat dua hal mendasar dalam perubahan metode baru ini. Kedua hal mendasar terdapat pada aspek indikator dan cara penghitungan indeks.

Pada metode baru, UNDP memperkenalkan indikator baru pada dimensi pengetahuan yaitu Harapan Lama Sekolah (*Expected Years of Schooling*). Indikator ini digunakan untuk menggantikan indikator AMH yang memang saat ini sudah tidak relevan karena capaian di banyak negara sudah sangat tinggi. UNDP juga menggunakan indikator PNB per kapita untuk menggantikan indikator PDB per kapita.

Selain indikator baru, UNDP melakukan perubahan cara penghitungan indeks. Pada metode lama, agregasi indeks komposit menggunakan rata-rata aritmatik. Berbeda pada metode baru menggunakan rata-rata geometrik (*geometric mean*). Cara penghitungan indeks yang terbilang baru ini cenderung sensitif terhadap ketimpangan. Tidak seperti rata-rata aritmatik yang dapat menutupi ketimpangan yang terjadi antar dimensi, rata-rata geometrik menuntut keseimbangan ketiga dimensi IPM agar capaian IPM menjadi optimal. Metode agregasi indeks

komposit yang digunakan pada metode baru merupakan penyempurnaan metode lama.

**Tabel 2.2**  
**Perbedaan Indikator Metode Lama dan Metode Baru UNDP**

Dimensi	Metode Lama	Metode Baru
<b>Umur Panjang dan Hidup Sehat</b>	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)
<b>Pengetahuan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Angka Melek Huruf (AMH)</li> <li>• Kombinasi Angka Partisipasi Kasar ( APK )</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Harapan Lama Sekolah (HLS)</li> <li>• Rata-rata Lama Sekolah (RLS)</li> </ul>
<b>Standar Hidup Layak</b>	PDB per Kapita	PNB per Kapita

Perubahan mendasar yang terjadi pada penghitungan IPM tentunya membawa dampak. Secara langsung, ada dua dampak yang terjadi akibat perubahan metode penghitungan IPM. Pertama, perubahan level IPM. Secara umum, level IPM metode baru lebih rendah dibanding IPM metode lama. Hal ini terjadi karena perubahan indikator dan perubahan cara penghitungan. Penggantian indikator Angka Melek Huruf (AMH) menjadi Harapan Lama Sekolah (HLS) membuat angka IPM lebih rendah karena secara umum AMH sudah di atas 90 persen sementara HLS belum cukup optimal. Selain itu, perubahan rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik juga turut andil dalam penurunan level IPM metode baru. Ketimpangan yang terjadi antar dimensi akan mengakibatkan capaian IPM menjadi rendah.

Kedua, terjadi perubahan peringkat IPM. Perubahan indikator dan cara penghitungan membawa dampak pada perubahan peringkat IPM. Perubahan indikator berdampak pada perubahan indeks dimensi. Sementara perubahan cara penghitungan berdampak signifikan terhadap agregasi indeks. Namun, perlu dicatat bahwa peringkat IPM antara kedua metode tidak dapat dibandingkan karena kedua metode tidak sama.

Pada tahun 2014, Indonesia secara resmi melakukan penghitungan IPM dengan metode baru. Untuk mengaplikasikan metode baru, sumber data yang tersedia di Indonesia, yaitu :

- ✓ Angka harapan hidup saat lahir (Sensus Penduduk 2010/SP2010, Proyeksi Penduduk)
- ✓ Angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah (Survei Sosial Ekonomi Nasional/SUSENAS)
- ✓ PNB per kapita tidak tersedia pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sehingga diproksi dengan pengeluaran per kapita disesuaikan menggunakan data SUSENAS.

Indonesia melakukan beberapa penyesuaian terhadap metode baru. Penyesuaian ini dilakukan pada indikator PNB per kapita karena masalah ketersediaan data. Dari empat indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM metode baru, tiga diantaranya sama persis dengan UNDP. Khusus untuk PNB per kapita, indikator ini diproksi dengan pengeluaran per kapita.

Gambar 2.2  
Perbandingan IPM Metode Lama & Metode Baru







**METODOLOGI  
PENGHITUNGAN  
IPM**



# METODOLOGI PENGHITUNGAN IPM

## 3

### 3.1 KOMPONEN IPM

#### 3.1.1. Umur Harapan Hidup Saat Lahir

Sebenarnya cukup banyak indikator yang dapat digunakan untuk mengukur dimensi umur panjang dan sehat, namun dengan mempertimbangkan ketersediaan data secara umum, maka UNDP memilih indikator Umur Harapan Hidup waktu lahir (*life expectancy at birth*) sebagai salah satu komponen untuk penghitungan IPM. Umur harapan hidup saat lahir (UHH) merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Penghitungan umur harapan hidup melalui pendekatan tak langsung (*indirect estimation*).

Jenis data yang digunakan adalah Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Paket program *Mortpack* digunakan untuk menghitung angka harapan hidup berdasarkan input data ALH dan AMH. Selanjutnya, dipilih metode *Trussel* dengan model *West*, yang sesuai dengan histori kependudukan dan kondisi Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara umumnya (Preston, 2004). Indeks harapan hidup dihitung dengan menghitung nilai maksimum dan nilai minimum harapan hidup sesuai standar UNDP, yaitu angka tertinggi sebagai batas atas untuk penghitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah adalah 20 tahun.

Indikator umur harapan hidup saat lahir tidak mengalami perubahan pada metode baru. Akan tetapi, sumber data yang digunakan dalam penghitungan indikator ini telah diperbarui dengan menggunakan hasil Sensus Penduduk tahun 2010 (SP2010). Indikator ini menjadi indikator penting untuk melihat derajat kesehatan suatu masyarakat. Indikator ini tetap dipertahankan keberadaannya karena selain relevansinya, juga ketersediaan data hingga tingkat kabupaten/kota cukup memadai.

### **3.1.2. Tingkat Pendidikan**

Salah satu komponen pembentuk IPM adalah dari dimensi pengetahuan yang diukur melalui tingkat pendidikan. Dalam hal ini, indikator yang digunakan adalah rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) dan harapan lama sekolah (*expected years of schooling*). Indikator harapan lama sekolah merupakan indikator baru menggantikan angka melek huruf. Seperti pada penjelasan sebelumnya, indikator angka melek huruf sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini. Pada proses pembentukan IPM, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah diberi bobot yang sama, kemudian penggabungan kedua indikator ini digunakan sebagai indeks pendidikan sebagai salah satu komponen pembentuk IPM.

#### **a. Harapan Lama Sekolah (HLS)**

Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai

jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Seperti halnya rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah juga menggunakan batasan yang dipakai sesuai kesepakatan UNDP. Batas maksimum untuk harapan lama sekolah adalah 18 tahun, sedangkan batas minimumnya 0 (nol).

b. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Indikator rata-rata lama sekolah tetap dipertahankan karena menggambarkan stok yang terjadi pada dunia pendidikan. Namun, cakupan penghitungan yang digunakan pada metode baru telah diganti. Pada metode lama, cakupan penduduk yang dihitung adalah penduduk berusia 15 tahun ke atas. Sementara pada metode baru, cakupan penduduk yang dihitung adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas sesuai dengan rekomendasi UNDP. Selain untuk keterbandingan dengan internasional, alasan penting lain yaitu bahwa pada umumnya penduduk berusia 25 ke atas tidak bersekolah lagi. Walaupun sebagian kecil ada yang masih bersekolah, jumlahnya tidak signifikan. Penduduk usia 25 tahun ke atas merupakan stok pendidikan yang dimiliki oleh suatu wilayah.

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Penghitungan rata-rata lama sekolah menggunakan dua batasan yang dipakai sesuai kesepakatan UNDP. Rata-rata lama

sekolah memiliki batas maksimumnya 15 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun.

### 3.1.3. Standar Hidup Layak

Dimensi lain dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak. Dalam cakupan lebih luas, standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita yang disesuaikan. Indikator PNB per kapita lebih menggambarkan kesejahteraan masyarakat dibanding pengeluaran per kapita, namun data ini tidak tersedia hingga tingkat kabupaten/kota. Saat ini BPS masih menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan paritas daya beli (*purcashing power parity*) berbasis formula Rao.

$$PPP_j = \prod_{i=1}^m \left( \frac{p_{ij}}{p_{ik}} \right)^{\frac{1}{m}}$$

Ada perubahan pada penghitungan paritas daya beli (*purcashing power parity*) yang digunakan. Pada metode lama, terdapat 27 komoditas yang digunakan dalam penghitungan paritas daya beli. Sementara pada metode baru terdapat 96 komoditas yang digunakan. Hal ini dilakukan karena selama 1990 hingga 2014 telah terjadi banyak perubahan pola konsumsi masyarakat sehingga komoditas penghitungan paritas daya beli juga harus diperbarui.

Penghitungan paritas daya beli dilakukan berdasarkan 96 komoditas kebutuhan pokok seperti terlihat dalam Tabel 2.3. Batas maksimum dan minimum penghitungan pengeluaran per kapita yang digunakan dalam penghitungan IPM seperti terlihat dalam Tabel 2.4. Batas maksimum pengeluaran per kapita adalah sebesar Rp 26.572.352 sementara batas minimumnya adalah Rp 1.007.436.

**Tabel 3.1**  
**Komoditi Kebutuhan Pokok sebagai Dasar Penghitungan Daya Beli (PPP)**

Beras	Pisang lainnya	Rokok kretek tanpa filter
Tepung terigu	Pepaya	Rokok putih
Ketela pohon/singkong	Minyak kelapa	Rumah sendiri/bebas sewa
Kentang	Minyak goreng lainnya	Rumah kontrak
Tongkol/tuna/cakalang	Kelapa	Rumah sewa
Kembung	Gula pasir	Rumah dinas
Bandeng	Teh	Listrik
Mujair	Kopi	Air PAM
Mas	Garam	LPG
Lele	Kecap	Minyak tanah
Ikan segar lainnya	Penyedap masakan/vetsin	Lainnya(batu baterai,aki,korek,obat
Daging sapi	Mie instan	Perlengkapan mandi
Daging ayam ras	Roti manis/roti lainnya	Barang kecantikan
Daging ayam kampung	Kue kering	Perawatan kulit,muka,kuku,rambut
Telur ayam ras	Kue basah	Sabun cuci
Susu kental manis	Makanan gorengan	Biaya RS Pemerintah
Susu bubuk	Gado-gado/ketoprak	Biaya RS Swasta
Susu bubuk bayi	Nasi campur/rames	Puskesmas/pustu
Bayam	Nasi goreng	Praktek dokter/poliklinik
Kangkung	Nasi putih	SPP
Kacang panjang	Lontong/ketupat sayur	Bensin

Bawang merah	Soto/gule/sop/rawon/cin cang	Transportasi/pengangkutan umum
Bawang putih	Sate/tongseng	Pos dan Telekomunikasi
Cabe merah	Mie bakso/mie rebus/mie goreng	Pakaian jadi laki-laki dewasa
Cabe rawit	Makanan ringan anak	Pakaian jadi perempuan dewasa
Tahu	Ikan (goreng/bakar dll)	Pakaian jadi anak-anak
Tempe	Ayam/daging (goreng dll)	Alas kaki
Jeruk	Makanan jadi lainnya	Minyak Pelumas
Mangga	Air kemasan galon	Meubelair
Salak	Minuman jadi lainnya	Peralatan Rumah Tangga
Pisang ambon	Es lainnya	Perlengkapan perabot rumah tangga
Pisang raja	Rokok kretek filter	Alat-alat Dapur/Makan

### 3.2 PENYUSUNAN IPM

Sebelum menghitung IPM, setiap komponen IPM harus dihitung indeksinya. Formula yang digunakan dalam penghitungan indeks komponen IPM adalah sebagai berikut :

$$I_{AHH} = \frac{UHH - UHH_{min}}{UHH_{max} - UHH_{min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{max} - RLS_{min}}$$

$$I_{pengetahuan} = \frac{I_{HLS} - I_{minRLS}}{2}$$

$$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{min})}{\ln(\text{pengeluaran}_{max}) - \ln(\text{pengeluaran}_{max:min})}$$

Untuk menghitung indeks masing-masing komponen IPM digunakan batas maksimum dan minimum seperti terlihat dalam Tabel 2.4.

**Tabel 3.2**  
**Nilai Maksimum dan Minimum dari Setiap Komponen IPM**

Komponen IPM	Satuan	Minimum	Maksimum
Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH)	Tahun	20	85
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	0	18
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	0	15
Pengeluaran per Kapita	Rupiah	1.007.436	26.572.352

Keterangan:

\* Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris) yaitu di Tolikara Papua

\*\*Daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2025 (akhir RPJPN) yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta Selatan tahun 2025

Selanjutnya nilai IPM dapat dihitung sebagai :

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}}$$

dimana :

$I_{kesehatan}$  = Indeks Kesehatan

$I_{pengetahuan}$  = (Angka Harapan Lama Sekolah+Rata-rata lama Sekolah) / 2

$I_{pengeluaran}$  = Indeks Pengeluaran (daya beli)

Kecepatan perubahan IPM juga menjadi salah satu fokus dalam pembangunan manusia. Untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan ukuran pertumbuhan per tahun. Pada metode lama, kecepatan perubahan IPM diukur dengan menggunakan reduksi *shortfall*. Pada metode baru, kecepatan perubahan IPM diukur dengan menggunakan pertumbuhan aritmatik.

Pertumbuhan IPM menunjukkan perbandingan antara perubahan capaian terkini dengan capaian tahun sebelumnya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan IPM, maka semakin cepat pula peningkatan IPM. Indikator pertumbuhan IPM ini dapat digunakan sebagai kinerja pembangunan manusia suatu wilayah pada kurun waktu tertentu.

$$\text{Pertumbuhan IPM} = \frac{IPM_t - IPM_{t-1}}{IPM_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

$IPM_t$  : IPM suatu wilayah pada tahun  $t$

$IPM_{(t-1)}$  : IPM suatu wilayah pada tahun  $(t-1)$

### 3.3 KLASIFIKASI PEMBANGUNAN MANUSIA

Untuk melihat perkembangan tingkatan status IPM di suatu wilayah, dibedakan menjadi 4 (empat) kriteria seperti pada Gambar 3.1.

**Gambar 3.1**  
**Klasifikasi Pencapaian IPM**



Jika status pembangunan manusia masih berada pada kriteria rendah hal ini berarti kinerja pembangunan manusia daerah tersebut masih memerlukan perhatian khusus untuk mengejar ketinggalannya. Begitu juga jika status pembangunan manusia masih berada pada kriteria menengah, berarti pembangunan manusia masih perlu ditingkatkan.

Jika daerah tersebut mempunyai status pembangunan manusia tinggi, berarti kinerja pembangunan manusia daerah tersebut sudah baik/optimal maka perlu dipertahankan agar kualitas SDM lebih produktif.



BAB

4

**KONDISI UMUM  
KABUPATEN  
SAMOSIR**



# KONDISI UMUM KABUPATEN SAMOSIR



## 4.1 LETAK GEOGRAFIS

Berdasarkan Undang Undang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 36 Tahun 2003 yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 18 Desember 2003, menetapkan terbentuknya Kabupaten Samosir sebagai kabupaten pemekaran dari Kabupaten Tobasa, yang terbagi atas 9 (sembilan) wilayah kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Sianjur Mulamula,
2. Kecamatan Harian,
3. Kecamatan Sitio-tio,
4. Kecamatan Onan Runggu,
5. Kecamatan Nainggolan,
6. Kecamatan Palipi,
7. Kecamatan Ronggur Nihuta,
8. Kecamatan Pangururan
9. Kecamatan Simanindo,

Secara geografis, Kabupaten Samosir terletak pada posisi antara 2<sup>o</sup>21'38'' dan 2<sup>o</sup>49'48'' Lintang Utara, dan antara 98<sup>o</sup>24'00'' dan 99<sup>o</sup>01'48'' Bujur Timur, dengan ketinggian antara 904 meter dan 2.157 meter di atas permukaan laut.

Kabupaten Samosir merupakan daerah pulau yaitu seluruh Pulau Samosir yang dikelilingi oleh Danau Toba ditambah sebagian wilayah daratan Pulau Sumatera. Luas wilayahnya mencapai 2.069,05 km<sup>2</sup>, terdiri dari luas daratan 1.444,25 km<sup>2</sup> dan danau 624, 80 km<sup>2</sup>. Topografi dan kontur tanah yang beraneka ragam, yaitu datar, landai, miring dan terjal, dengan struktur labil dan berada pada jalur gempa tektonik dan vulkanik.

Sebagai kabupaten yang dikelilingi oleh beberapa kabupaten, maka batas-batas dari Kabupaten Samosir adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Danau Toba,  
Sebelah Timur : berbatasan dengan Danau Toba,  
Sebelah Selatan : berbatasan dengan Danau Toba dan Kabupaten Humbang Hasundutan, dan  
Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Dairi

Pembagian luas daratan menurut kecamatan antara lain: Sianjur Mulamula 140,24 km<sup>2</sup> (9,71 persen), Kecamatan Harian 560,45 km<sup>2</sup> (38,81 persen), Kecamatan Sitiotio 50,76 km<sup>2</sup> (3,51 persen), Kecamatan Onan Runggu 60,89 km<sup>2</sup> (4,22 persen), Kecamatan Nainggolan 87,86 km<sup>2</sup> (6,08 persen), Kecamatan Palipi 129,55 km<sup>2</sup> (8,97 persen), Kecamatan Ronggur Nihuta 94,87 km<sup>2</sup> (6,57 persen), Kecamatan Pangururan 121,43 km<sup>2</sup> (8,41 persen), Kecamatan Simanindo 198,20 km<sup>2</sup> (13,72 persen).

## 4.2 KEPENDUDUKAN

Dalam pelaksanaan pembangunan, penduduk merupakan faktor yang sangat dominan karena penduduk tidak saja sebagai pelaksana tetapi juga menjadi sasaran dari pembangunan. Oleh sebab itu untuk menunjang

keberhasilan pembangunan perkembangan penduduk harus diarahkan sehingga mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang menguntungkan pembangunan.

Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera menyebutkan bahwa perkembangan kependudukan diarahkan pada pengendalian kuantitas, pengembangan kualitas, serta pengarahan mobilitas penduduk, sebagai potensi sumber daya manusia agar menjadi kekuatan pembangunan. Lebih lanjut pasal 4 ayat (1) menyebutkan tujuan dari perkembangan kependudukan, yaitu untuk mewujudkan keserasian, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, persebaran penduduk dengan lingkungan hidup.

Untuk mewujudkan perkembangan penduduk sebagaimana ditetapkan oleh UU No.10 Tahun 1992 tersebut perlu ditetapkan kebijaksanaan dalam hal kuantitas penduduk yang berhubungan dengan penetapan jumlah, struktur dan komposisi, pertumbuhan dan persebaran yang ideal, sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

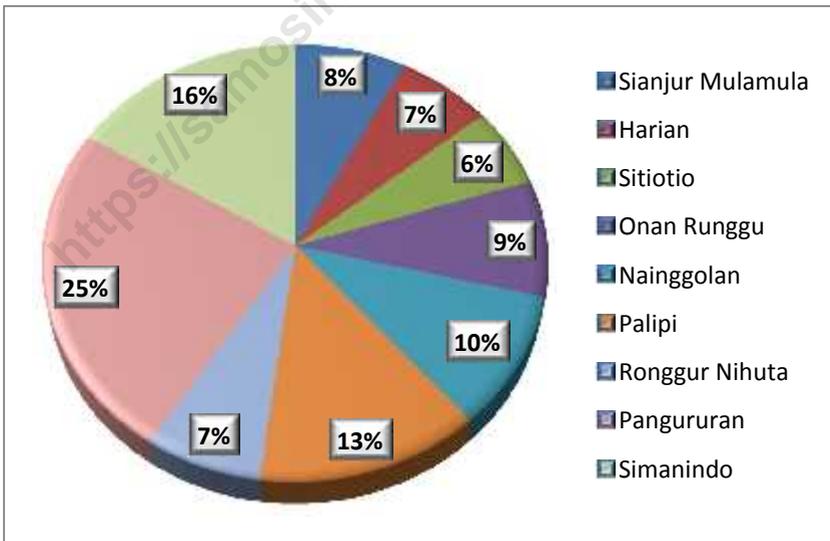
#### **4.2.1 Jumlah dan Persebaran Penduduk**

Jumlah penduduk Kabupaten Samosir tahun 2017 adalah 125.099 jiwa yang tersebar di 9 (sembilan) kecamatan. Berdasarkan kecamatan, wilayah Kabupaten Samosir dengan jumlah penduduk yang terbanyak berada di Kecamatan Pangururan yaitu sebanyak 30.803 jiwa atau 24,62 persen dari jumlah seluruh penduduk Kabupaten Samosir dengan tingkat kepadatan 253,67 jiwa/km<sup>2</sup>.

Sedangkan wilayah kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Kecamatan Siotio yaitu sebanyak 7.408 jiwa atau 5,92 persen dari jumlah seluruh penduduk Kabupaten Samosir dengan tingkat kepadatan 145,94 jiwa/km<sup>2</sup>.

Kecamatan yang mempunyai angka kepadatan penduduk paling kecil adalah Kecamatan Harian, walaupun merupakan kecamatan yang paling luas wilayahnya, yaitu mencapai 560,45 km<sup>2</sup>, namun hanya didiami oleh penduduk sebanyak 8.195 jiwa (6,55 persen) dengan dengan tingkat kepadatan 14,62 jiwa/km<sup>2</sup>. Hal ini disebabkan karena sebagian besar wilayahnya merupakan areal hutan produksi maupun hutan lindung dan juga areal pertanian.

**Gambar 4.1**  
**Persentase Penduduk per Kecamatan Kabupaten Samosir Tahun 2017**



Sumber : BPS Prov. Sumut \_Angka Proyeksi Penduduk Pertengahan Tahun 2017

#### 4.2.2 Komposisi Umur

Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin merupakan variabel penting dalam demografi. Hampir semua pembahasan mengenai masalah kependudukan melibatkan variabel umur dan jenis kelamin penduduk. Struktur umur penduduk antar daerah yang satu dengan daerah lain tidak sama. Struktur umur penduduk dipengaruhi oleh tiga variabel demografi yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Faktor sosial ekonomi di suatu daerah akan mempengaruhi struktur umur penduduk berdasarkan ketiga variabel diatas.

Struktur umur penduduk akan terlihat lebih sederhana untuk dianalisis jika dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar, yaitu 0-14 tahun, 15-64 tahun, dan 65 tahun ke atas seperti berikut ini.

**Tabel 4.1**  
**Banyaknya Penduduk di Kabupaten Samosir**  
**Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin, dan Rasio Jenis Kelamin**  
**Tahun 2017**

Kelompok Umur (Tahun)	Jenis Kelamin		Laki-laki + Perempuan	Rasio Jenis Kelamin
	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0 - 14	22 733	21 350	44 083	106,48
15 - 64	36 030	36 184	72 214	99,57
65 +	3 451	5 351	8 802	64,49
<b>Jumlah</b>	<b>62 214</b>	<b>62 885</b>	<b>125 099</b>	<b>98,90</b>

Sumber : BPS Prov. Sumut\_ Angka Proyeksi Penduduk Pertengahan Tahun 2017

**Gambar 4.2**  
**Komposisi Penduduk Kabupaten Samosir**  
**Menurut Kelompok Umur Tahun 2013-2017**



Sumber : BPS Prov. Sumut\_ Angka Proyeksi Penduduk Pertengahan 2017

Suatu wilayah dikatakan mempunyai struktur umur muda jika proporsi penduduk usia dibawah 15 tahun (0-14) tahun lebih atau sama dengan 40 persen dan kelompok penduduk berusia 15-64 tahun kurang atau sama dengan 55 persen, sementara proporsi kelompok umur usia 65 tahun ke atas kurang atau sama dengan 5 persen. Sebaliknya suatu struktur umur penduduk dikatakan tua jika proporsi penduduk usia 0-14 tahun kurang dari atau sama dengan 30 persen dan kelompok penduduk berusia 15-64 tahun lebih besar atau sama dengan 60 persen, sementara proporsi kelompok usia 65 persen lebih atau sama dengan 10 persen. Berdasarkan umur median suatu negara atau daerah termasuk penduduk muda apabila memiliki umur median

penduduk kurang atau sama dengan 20 tahun, intermediate apabila umur mediannya 21-29 tahun dan penduduk tua apabila umur mediannya lebih besar atau sama dengan 30 tahun.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa struktur umur penduduk Kabupaten Samosir dapat dikategorikan kelompok penduduk *intermediate* yang tidak tergolong tua dan juga tidak muda, dimana proporsi penduduk umur 0-14 tahun pada tahun 2017 sebesar 35,24 persen dan komposisi umur 15-64 tahun sebesar 57,73 persen. Sementara proporsi penduduk usia 65 tahun ke atas yaitu hanya sebesar 7,04 persen. Hal tersebut diduga akibat masih tingginya kelahiran dan migrasi keluar penduduk usia produktif di Kabupaten Samosir. Dari data tersebut, maka diharapkan kebijakan pemerintah harus lebih banyak dititikberatkan kepada pemenuhan kebutuhan penduduk terutama di bidang pendidikan dan penyediaan lapangan kerja.

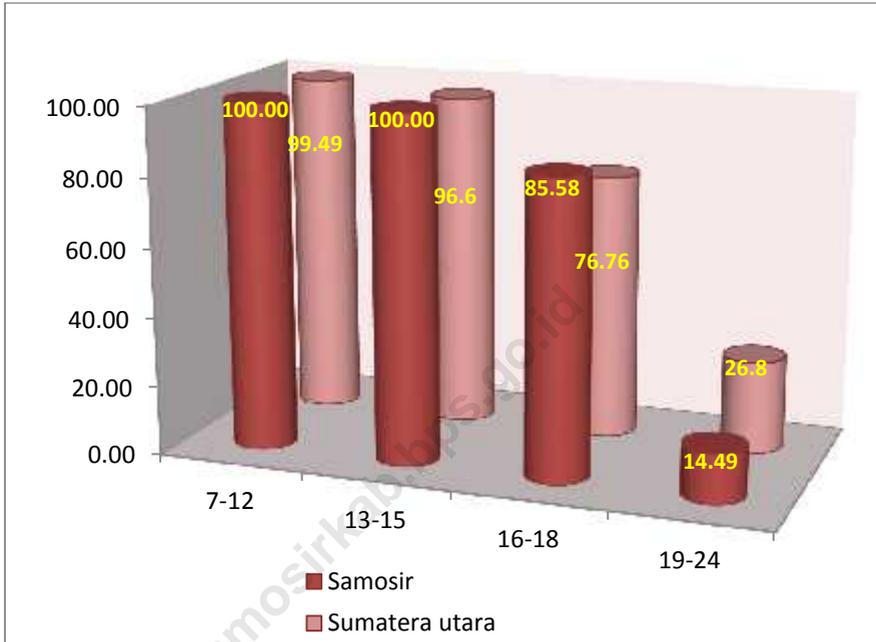
### **4.3 TINGKAT PENDIDIKAN**

Salah satu amanat yang diemban pemerintah menurut UUD 1945 adalah upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejauh mana amanat ini dilaksanakan tercermin dari profil pendidikan penduduk yang akan dibahas dalam uraian berikut ini, yang akan menyajikan gambaran umum mengenai angka partisipasi sekolah dan tingkat pendidikan (formal) yang dicapai.

#### **4.3.1 Angka Partisipasi Sekolah**

Gambar 4.3 menyajikan perbandingan partisipasi sekolah penduduk menurut kelompok umur antara Kabupaten Samosir dan Propinsi Sumatera Utara secara keseluruhan tahun 2017.

**Gambar 4.3**  
**Persentase Penduduk Kabupaten Samsir dan Sumatera Utara**  
**Yang Masih Sekolah menurut Kelompok Umur, 2017**



Sumber : BPS Kabupaten Samsir\_Susenas 2017

Bila diamati menurut kelompok umur, partisipasi sekolah usia 7-12 tahun di Kabupaten Samsir tahun 2017 adalah sebesar 100 persen atau tidak ditemukan lagi penduduk usia 7-12 tahun yang belum menikmati fasilitas pendidikan SD. Sementara partisipasi sekolah usia 7-12 tahun untuk Provinsi Sumatera Utara tahun 2017 sebesar 99,49 persen. Sedangkan angka partisipasi sekolah usia 13-15 tahun Kabupaten Samsir adalah sebesar 100 persen, atau tidak ditemukan lagi penduduk usia 13-15 tahun yang belum menikmati fasilitas pendidikan SMP. Sedangkan partisipasi sekolah kelompok usia 13-15 tahun Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar 96,6 persen.

Partisipasi sekolah untuk kelompok umur 16-18 tahun Samosir selama tahun 2017 adalah sebesar 85,58 persen yang berarti bahwa sekitar 14,42 persen penduduk usia 16-18 tahun belum menikmati fasilitas pendidikan SMA. Sedangkan partisipasi sekolah kelompok usia 16-18 tahun Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar 76,76 persen. Hal ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Samosir selama tahun 2017, tingkat partisipasi sekolah usia SD (7-12 tahun) dan usia SMP (13-15 tahun) masih lebih besar dari partisipasi usia SMA (16-18 tahun), serta usia Diploma/Sarjana (19-24 tahun). Faktor ekonomi diduga menjadi salah satu faktor penyebab hal tersebut. Secara umum, kemampuan ekonomi masyarakat Kabupaten Samosir masih tergolong menengah ke bawah sehingga masyarakat kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan pendidikan sampai ke jenjang perguruan tinggi. Disamping itu juga keterbatasan fasilitas pendidikan jenjang pendidikan tinggi yaitu Diploma/Sarjana di Kabupaten Samosir juga sebagai faktor penyebab yang dapat memungkinkan rendahnya partisipasi sekolah di Kabupaten Samosir untuk pendidikan tinggi.

#### **4.3.2 Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan**

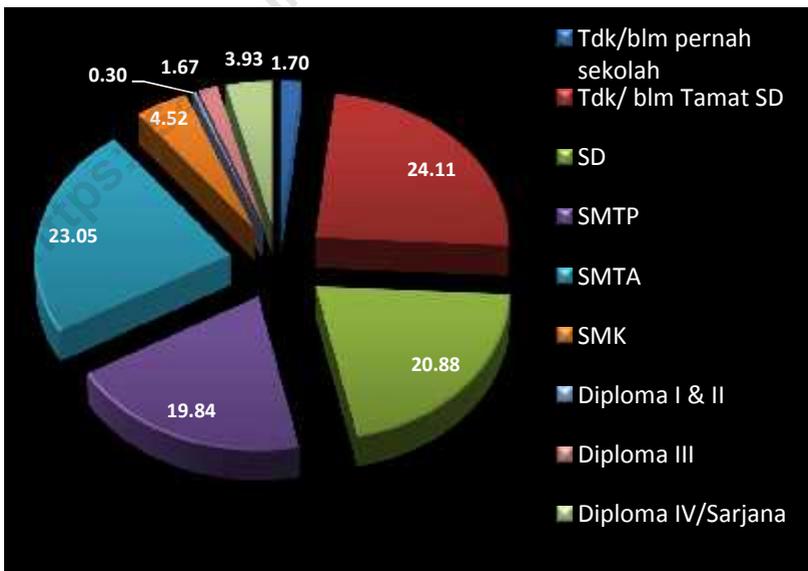
Sebagaimana halnya dengan Angka Partisipasi Sekolah, tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk 10 tahun ke atas juga merupakan salah satu indikator untuk mengukur hasil pembangunan di bidang pendidikan.

Gambar 4.4 menunjukkan bahwa pada tahun 2017 di Kabupaten Samosir masih terdapat 1,70 persen penduduk berumur 10 tahun ke atas yang “seharusnya” pernah sekolah tetapi pada kenyataannya tidak/belum pernah sekolah.

Hal ini mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan angka penduduk berumur 10 tahun ke atas yang tidak/belum pernah sekolah di tahun 2015 yaitu sebanyak 0,01 persen.

Modus tingkat pendidikan tertinggi di Kabupaten Samosir selama tahun 2017 adalah tidak/belum tamat SD 24,11 persen, tamat SMTA Umum sebanyak 23,05 persen, tamat SD sebanyak 20,88 persen, kemudian penduduk berumur 10 tahun ke atas yang tamat SMP sebesar 19,84 persen. Sementara persentase penduduk 10 tahun ke atas yang tamat SMK sebanyak 4,52 persen, diikuti Perguruan Tinggi/Universitas pada tahun 2017 sebanyak 3,93 persen.

**Gambar 4.4**  
**Tingkat Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan**  
**Penduduk Kabupaten Samosir Usia 10 tahun ke atas, Tahun 2017**



Sumber : BPS Kabupaten Samosir\_ Susenas 2017

## 4.4 TINGKAT KESEHATAN

### 4.4.1 Penyediaan Sarana Kesehatan

Kesehatan dapat dipandang sebagai salah satu bentuk investasi di masa mendatang dalam upaya pembangunan manusia yang berkualitas diukur dari derajat kesehatan. Pembangunan di bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Faktor-faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat diantaranya adalah kurangnya sarana pelayanan kesehatan, keadaan sanitasi dan lingkungan yang tidak memadai, dan rendahnya konsumsi makanan bergizi. Tetapi faktor terpenting dalam upaya peningkatan kesehatan ada pada manusia sebagai subyek dan sekaligus obyek dari upaya tersebut.

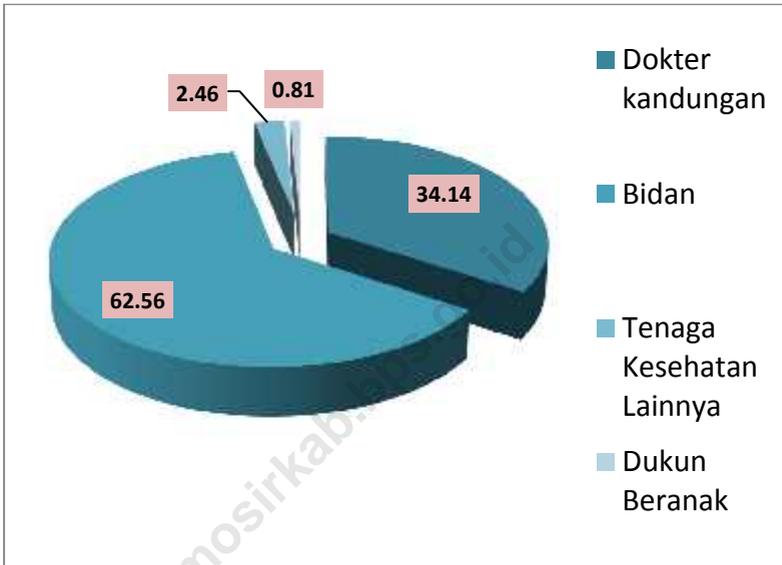
**Tabel 4.2**  
**Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten Samosir,**  
**Menurut Kecamatan Tahun 2017**

KECAMATAN	Rumah Sakit	Puskesmas	Pustu	Pos yandu	Klinik Ber salin	Pos Kesdes	Polin des
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Sianjur Mulamula	-	1	3	20	-	13	3
2. Harian	-	1	4	17	-	7	2
3. Siotio	-	1	3	13	-	4	1
4. Onan Runggu	-	1	3	22	-	6	-
5. Nainggolan	1	1	3	17	-	6	6
6. Palipi	-	1	3	38	-	15	3
7. Ronggur Nihuta	-	1	6	13	-	1	2
8. Pangururan	1	1	5	44	3	10	3
9. Simanindo	-	4	4	39	-	13	1
<b>SAMOSIR</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>34</b>	<b>223</b>	<b>3</b>	<b>75</b>	<b>21</b>

Sumber : BPS Kabupaten Samosir, 2017

#### 4.4.2 Tenaga Kesehatan Penolong Kelahiran

Gambar 4.5  
Persentase Balita Menurut Penolong Kelahiran Pertama, 2017



Sumber : BPS Prov. Sumut\_Susenas 2017

Kesehatan balita selain dipengaruhi oleh kesehatan ibu, dapat juga dipengaruhi oleh faktor lain, diantaranya adalah penolong kelahiran. Data komposisi penolong kelahiran bayi dapat dijadikan sebagai salah satu indikator kesehatan dalam hubungannya dengan tingkat kesehatan ibu dan anak serta pelayanan kesehatan secara umum. Dilihat dari kesehatan ibu dan anak, persalinan yang ditolong oleh tenaga medis seperti dokter dan bidan dapat dianggap lebih baik dibanding dengan yang ditolong oleh dukun, famili atau lainnya. Penanganan kelahiran bayi yang kurang baik dapat membahayakan kondisi ibu dan bayi yang dilahirkan seperti pendarahan,

kejang-kejang atau situasi yang lebih berbahaya dapat mengakibatkan kematian pada bayi dan atau si ibu.

#### **4.5 PEREKONOMIAN**

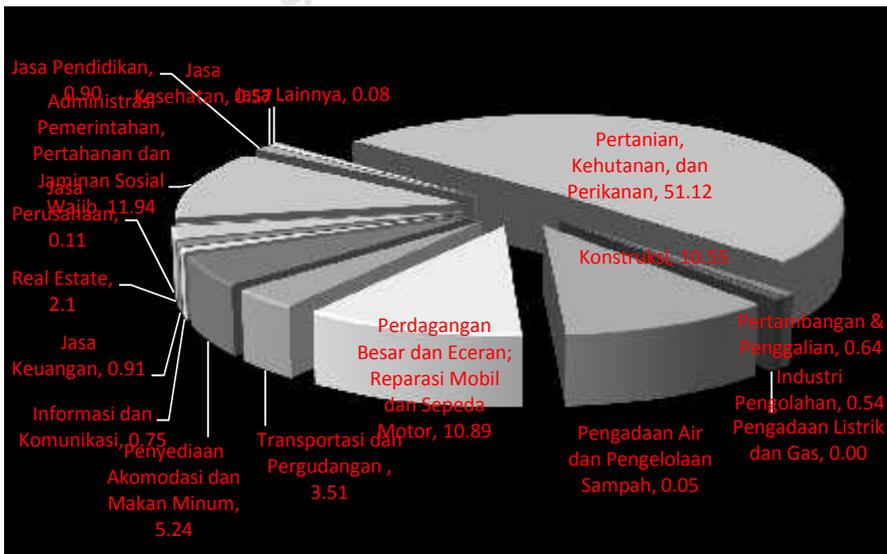
Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, serta tingkat pemerataan sebaik mungkin.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Pembentukan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Samosir tahun 2017 masih didominasi oleh kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan nilai sebesar Rp. 1.917,80 milyar (51,12 persen), diikuti kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial sebesar Rp. 447,82 milyar (11,94 persen), Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda motor sebesar Rp. 408,60 milyar (10,89 persen) dan Kategori Konstruksi mencapai Rp. 395,90 milyar (10,55 persen). Keempat kategori tersebut memberikan total peranan yaitu sebesar 84,50 persen terhadap pembentukan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Samosir.

Peranan ini sedikit mengalami penurunan bila dibandingkan tahun 2016 dimana total peranan keempat kategori tersebut mencapai 84,53 persen. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Samosir masih sangat tergantung pada keempat kategori tersebut.

Peranan kategori lain yang menonjol selama tahun 2017 antara lain kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 5,24 persen serta kategori Transportasi dan Pergudangan sebesar 3,51 persen. Sementara kategori lainnya memberikan sumbangan sebesar 6,75 persen terhadap perekonomian di Kabupaten Samosir meskipun peranan tersebut tidak terlalu besar/mempengaruhi. Distribusi persentase PDRB Kabupaten Samosir menurut sektor ekonomi dapat dilihat pada gambar berikut ini.

**Gambar 4.6**  
**Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Samosir**  
**Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2017**



Sumber: BPS Kabupaten Samosir, 2017

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Samosir tahun 2017 diukur berdasarkan kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK 2010 sebesar 5,35 persen dan mengalami percepatan bila dibandingkan tahun 2016 yaitu sebesar 5,27 persen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 7,92 persen, disusul oleh kategori Transportasi dan Pergudangan sebesar 7,84 persen, kategori Informasi dan Komunikasi sebesar 7,65 persen, dan kategori Pertambangan dan Penggalian sebesar 7,61 persen. Sementara kategori yang tumbuh dibawah 6 persen, antara lain kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, kategori Jasa Keuangan dan Asuransi, kategori Industri Pengolahan, kategori Pengadaan Listrik dan Gas, serta kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, kategori pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan daur ulang, kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, kategori Real Estate, kategori Jasa Perusahaan, kategori Jasa Pendidikan, Kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

**Gambar 4.7**  
**Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Samosir dan**  
**Provinsi Sumatera Utara ADH Konstan Tahun 2013-2017**



*Sumber: BPS Kabupaten Samosir, 2017*

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita Kabupaten Samosir Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2017 sebesar Rp. 29,99 juta mengalami peningkatan dari tahun 2016 dimana PDRB per Kapita nya adalah sebesar Rp. 27,66 juta dan pada tahun 2015 sebesar Rp. 25,40 juta. Perkembangan struktur perekonomian Kabupaten Samosir dilihat dari PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 sejak tahun 2013-2017, dapat digambarkan sebagai berikut.

**Gambar 4.8**  
**Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Samosir**  
**Tahun 2013-2017**



Sumber: BPS Kabupaten Samosir, 2017



BAB

5

**POSISI  
PEMBANGUNAN  
MANUSIA**



# POSISI PEMBANGUNAN MANUSIA

## 5

### 5.1 KOMPONEN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

#### 5.1.1 Umur Harapan Hidup Kabupaten Samosir

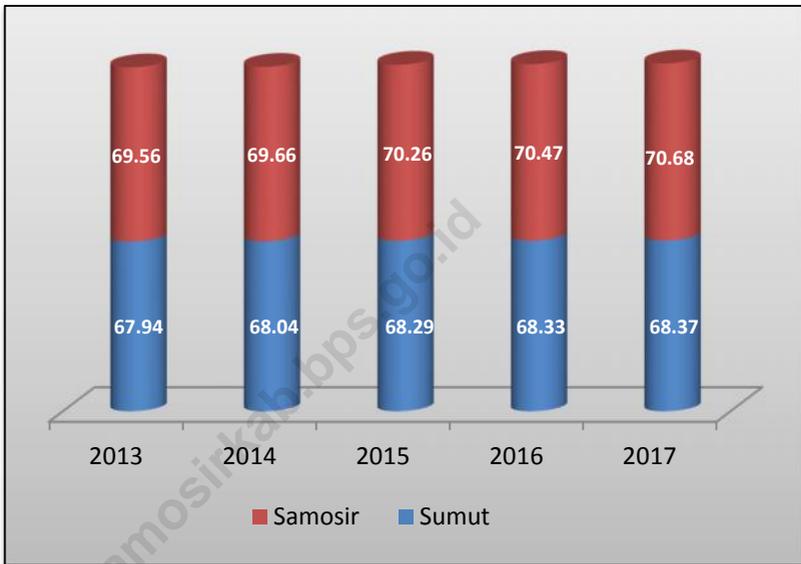
Umur Harapan Hidup merupakan salah satu indikator *output* pembangunan di bidang kesehatan dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas. Umur Harapan Hidup bahkan sering dikaitkan dengan tingkat kemajuan suatu negara/daerah, karena pada umumnya negara yang kurang maju bahkan miskin dan terbelakang menunjukkan Umur Harapan Hidup rendah atau bahkan sebaliknya negara/daerah yang sudah maju menunjukkan Umur Harapan Hidup yang tinggi, yang berarti pula secara rata-rata sumber daya manusia di suatu negara/daerah yang maju lebih sehat dan berkualitas dibandingkan dengan negara/daerah yang terbelakang bahkan miskin. Oleh karena itu pembangunan di segala aspek khususnya bidang kesehatan yaitu peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup manusia, serta mempersiapkan generasi yang sehat dan berkualitas, mutlak harus dilakukan. Pemerataan pelayanan kesehatan yang berkualitas sangat diperlukan demi tercapainya masyarakat yang sehat tanpa terkecuali di Kabupaten Samosir.

Umur Harapan Hidup adalah perkiraan jumlah tahun hidup/ umur penduduk di suatu negara atau wilayah tertentu. Umur Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan

kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Umur Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus ditanggulangi dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan. Peningkatan usia harapan hidup penduduk dari suatu negara merupakan efek keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi dinegara tersebut. Meningkatnya daya beli masyarakat akan berbanding lurus dengan peningkatan beberapa faktor yaitu akses terhadap pelayanan kesehatan, mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik. Pendidikan yang lebih baik tentunya bertujuan untuk memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, dimana tujuan akhirnya adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidupnya. Derajat kesehatan masyarakat sangat dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu: Lingkungan, Pelayanan Kesehatan, Keturunan, dan Perilaku masyarakat.

Umur Harapan Hidup di Kabupaten Samosir dari tahun ke tahun semakin meningkat. Selama periode 2013 hingga 2017, Kabupaten Samosir berhasil meningkatkan Umur Harapan Hidup saat lahir sebesar 1,12 tahun. Selama periode tersebut, secara rata-rata Umur Harapan Hidup tumbuh sebesar 0,34 persen per tahun. Tahun 2013, Umur Harapan Hidup saat lahir di Kabupaten Samosir sebesar 69,56 tahun, dan tahun 2017 telah mencapai 70,68 tahun. Secara umum dapat dikatakan bahwa kondisi kesehatan makro di Kabupaten Samosir membaik. Hal ini digambarkan melalui Umur Harapan Hidup Kabupaten Samosir lebih tinggi dibanding Umur Harapan Hidup Sumatera Utara tahun 2017 sebesar 68,37 tahun.

**Gambar 5.1**  
**Umur Harapan Hidup Kabupaten Samsir**  
**dan Provinsi Sumatera Utara**  
**Tahun 2013-2017**



Sumber : BPS Propinsi Sumatera Utara, 2017

### 5.1.2 Indeks Pengetahuan Kabupaten Samsir

Peningkatan kualitas SDM ditentukan oleh kualitas dan sistem pendidikan yang diterima. Pendidikan mempunyai peranan penting bagi bangsa dan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia. Pentingnya pendidikan tercermin dalam pasal pada UUD 1945, yang mengatakan bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian

program pendidikan mempunyai andil besar terhadap kemajuan bangsa, baik di bidang ekonomi maupun sosial dan budaya.

Keseriusan pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan terlihat melalui pelaksanaan Program Wajib Belajar 6 tahun yang telah dimulai sejak tahun 1984. Sejak tahun 1994 program wajib belajar yang dilaksanakan menjadi wajib belajar 9 tahun. Hal serupa juga dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Samosir, tidak hanya turut serta menyukseskan program wajib belajar 9 tahun, tetapi juga turut mendukung program pemerintah lainnya di bidang pendidikan, diantaranya memberikan subsidi biaya pendidikan. Dengan demikian diharapkan tingkat pendidikan penduduknya akan semakin baik dan jumlah penduduk yang buta huruf akan berkurang terutama pada penduduk usia sekolah (7-24 tahun). Secara umum keadaan pendidikan digambarkan oleh beberapa indikator antara lain: harapan lama sekolah (*Expected Years of Schooling*) dan rata-rata lama sekolah (*Mean Years of Schooling*).

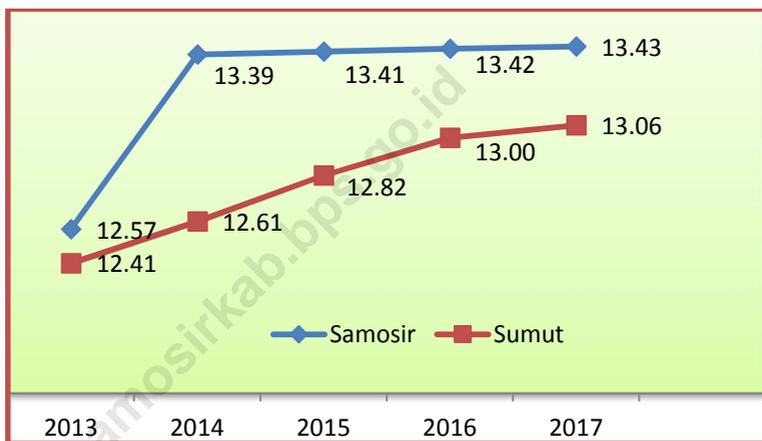
### **5.1.2.1 Harapan Lama Sekolah (HLS)**

Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.

Selama periode 2013 hingga 2017, Harapan Lama Sekolah secara rata-rata tumbuh sebesar 1,85 persen per tahun. Meningkatnya Harapan Lama Sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang

bersekolah. Tahun 2017, Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Samsir telah mencapai 13,43 tahun yang berarti anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus SMA atau D1.

**Gambar 5.2**  
**Harapan Lama Sekolah**  
**Kabupaten Samsir dan Provinsi Sumatera Utara**  
**Tahun 2013-2017**



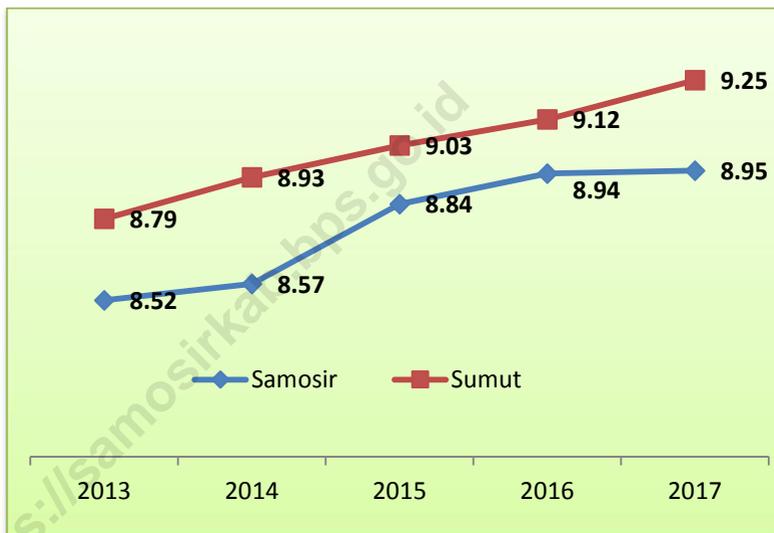
Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara, 2017

### 5.1.2.2 Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata lama sekolah mengindikasikan makin tingginya pendidikan formal yang dicapai oleh masyarakat suatu daerah. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani. Rata-rata lama sekolah yaitu rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas di seluruh jenjang pendidikan formal yang diikuti. Untuk

meningkatkan rata-rata lama sekolah, pemerintah telah mencanangkan program wajib belajar 9 tahun atau pendidikan dasar hingga tingkat SLTP.

**Gambar 5.3**  
**Rata-rata Lama Sekolah**  
**Kabupaten Samosir dan Provinsi Sumatera Utara**  
**Tahun 2013-2017**

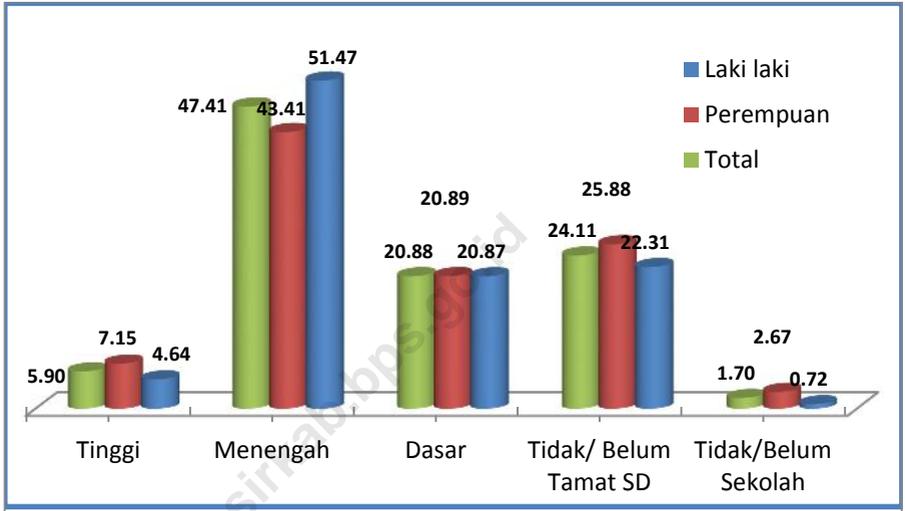


Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara, 2017

Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Kabupaten Samosir tumbuh 1,14 persen per tahun selama periode 2013 hingga 2017. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting bagi Kabupaten Samosir dalam membangun kualitas manusia yang lebih baik. Pada tahun 2017, Rata-rata Lama Sekolah penduduk Kabupaten Samosir usia 25 tahun ke atas mencapai 8,95 tahun atau hampir menyelesaikan pendidikan hingga kelas IX (SMP kelas III). Kondisi ini lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata

lama sekolah Provinsi Sumatera Utara secara umum yang tercatat sebesar 9,25 tahun.

**Gambar 5.4**  
**Persentase Penduduk 10 Tahun ke atas Menurut ijazah/STTB Tertinggi yang dimiliki ,2017**



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara, 2017

Kepedulian penduduk Kabupaten Samosir terhadap pendidikan dapat dilihat dengan lebih spesifik dari pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Penduduk laki-laki usia 10 tahun ke atas yang menamatkan jenjang pendidikan dasar (SD) sebesar 20,88 persen, lebih tinggi dibanding penduduk perempuan usia 10 tahun ke atas yang menamatkan jenjang pendidikan dasar (SD), yaitu sebesar 20,89 persen. Demikian halnya dengan penduduk laki-laki usia 10 tahun ke atas yang menamatkan pendidikan menengah (SMTP/SMTA Umum/SMTA Kejuruan) sebesar 47,41 persen masih lebih banyak jika dibandingkan dengan penduduk perempuan usia 10 tahun ke atas yang menamatkan pendidikan menengah (SMTP/SMTA Umum/ SMTA Kejuruan)

yaitu sebesar 43,41 persen. Sementara penduduk laki-laki yang menamatkan sampai jenjang pendidikan tinggi (Perguruan Tinggi) sebesar 5,90 persen. Angka tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan penduduk perempuan usia 10 tahun ke atas yang menamatkan sampai jenjang pendidikan tinggi yaitu sebesar 7,15 persen. Hal ini menunjukkan minat dan antusiasme penduduk perempuan di Kabupaten Samosir untuk mengenyam pendidikan tinggi lebih baik dari pada penduduk laki – laki. Secara tidak langsung, hal ini tentunya mendukung upaya dalam hal kesetaraan gender di Kabupaten Samosir.

Berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan menunjukkan bahwa secara rata-rata jenjang pendidikan ditamatkan adalah jenjang pendidikan menengah (SMTP/SMTA Umum/SMTA Kejuruan), kemudian diikuti pendidikan dasar dan paling sedikit adalah jenjang pendidikan tinggi.

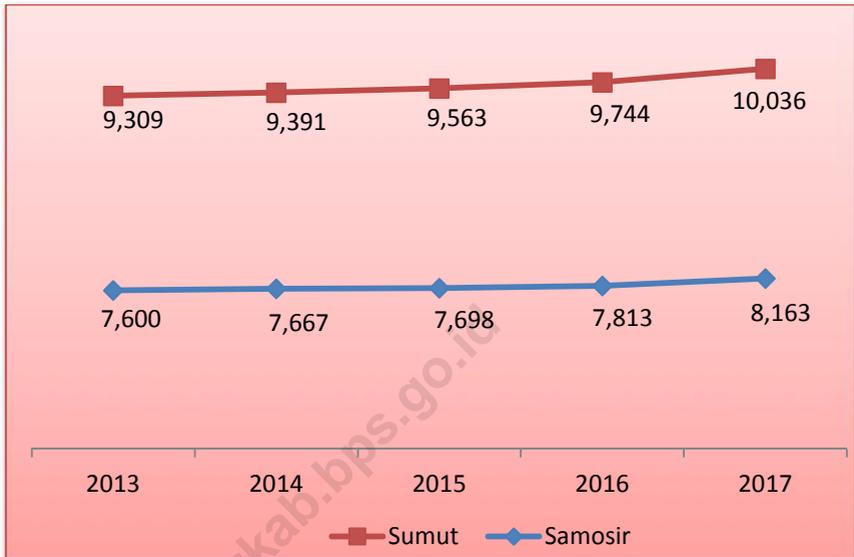
### **5.1.3 Indeks Daya Beli**

Indeks Daya Beli merupakan satu dari tiga komponen pembangunan manusia yang didasarkan pada paritas daya beli (*Purchasing Power Parity*) disesuaikan. Komponen kemampuan daya beli atau dikenal sebagai komponen standar hidup layak, yang digunakan pengeluaran perkapita yang disesuaikan. Adanya peningkatan daya beli menunjukkan adanya peningkatan kemampuan untuk hidup layak, hingga pada akhirnya peningkatan tersebut akan bermuara pada terentaskannya kemiskinan dalam masyarakat. Kesenjangan ekonomi yang terjadi antar golongan pendapatan juga perlu memperkaya analisis mengenai PPP ini. Bagaimanapun ekonomi tetaplah motor bagi pembangunan.

Dalam penghitungan tingkat daya beli digunakan pendekatan pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan dengan tingkat inflasi di daerah masing-masing. Penyesuaian ini diperlukan untuk menstandarkan tingkat harga yang berlaku di masing-masing daerah. Tingkat pengeluaran per kapita yang sama di suatu daerah belum tentu menunjukkan daya beli terhadap barang dan jasa yang sama karena tingkat harga di setiap daerah itu berbeda dan selera/pola konsumsi masyarakat berbeda. Oleh sebab itu pengeluaran per kapita ini terlebih dahulu disesuaikan untuk dapat mengukur tingkat daya beli yang nyata. Pada umumnya kondisi perekonomian yang semakin membaik, yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang positif akan berpengaruh terhadap semakin membaiknya daya beli atau pengeluaran riil per kapita masyarakat.

Selama lima tahun terakhir, pengeluaran per kapita kabupaten Samosir secara rata-rata meningkat sebesar 1,63 persen per tahun. Pada tahun 2017, pengeluaran per kapita penduduk Samosir sebesar Rp. 8.163.000 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 7.813.000 dan lebih tinggi bila dibandingkan dengan kabupaten sekitar yaitu Humbang Hasundutan sebesar Rp. 7.412.000 dan Pakpak Bharat sebesar Rp. 7.913.000. Namun bila dibandingkan dengan kabupaten sekitar yang lebih dahulu mekar, daya beli penduduk kabupaten Samosir tersebut lebih rendah. Yakni bila dibandingkan dengan kabupaten Tapanuli Utara sebesar Rp. 11.407.000 dan kabupaten Toba Samosir sebesar Rp. 11.846.000. Jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara secara umum, dapat dikatakan bahwa standar hidup penduduk di Samosir masih di bawah Provinsi Sumatera Utara yaitu sebesar Rp. 10.036.000.

**Gambar 5.5**  
**Tingkat Daya Beli Penduduk Samosir dan Sumatera Utara**  
**Tahun 2013-2017 (000 Rp)**



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara, 2017

## 5.2. KLASIFIKASI CAPAIAN IPM

Dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), UNDP membagi tingkatan capaian pembangunan manusia suatu negara atau wilayah ke dalam empat golongan/kriteria yaitu:

1. **Rendah** dengan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah kurang dari 60.
2. **Sedang** dengan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada diantara 60 sampai 70.
3. **Tinggi** dengan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada diantara 70 sampai 80.

4. **Sangat Tinggi** dengan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah 80 keatas.

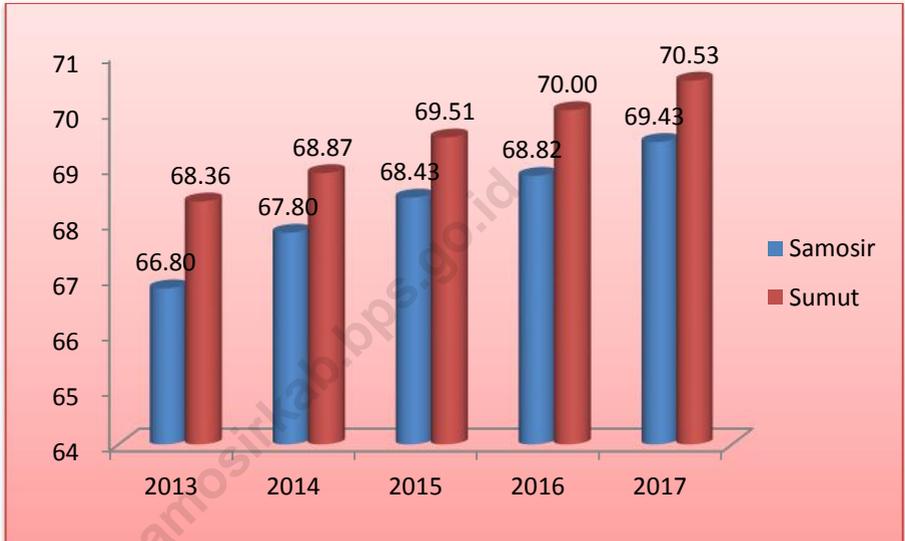
Berdasarkan keempat kriteria di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa jika status pembangunan manusia berada pada kriteria rendah, hal ini berarti kinerja pembangunan manusia daerah tersebut masih memerlukan perhatian khusus untuk mengejar ketertinggalannya. Begitu juga jika status pembangunan manusia berada pada kriteria sedang, berarti pembangunan manusia masih perlu ditingkatkan. Jika daerah tersebut mempunyai status pembangunan manusia tinggi hal ini berarti kinerja pembangunan manusia daerah tersebut sudah baik/optimal. Maka perlu dipertahankan supaya kualitas manusia tersebut lebih produktif sehingga memiliki produktivitas yang tinggi. Berikut ini disajikan uraian tingkatan status pembangunan manusia dengan kriteria sebagai berikut :

**Tabel 5.1**  
**Tingkatan Capaian IPM Metode Baru**

<b>Tingkatan Capaian</b>	<b>Kriteria</b>
Rendah	IPM < 60
Sedang	$60 \leq \text{IPM} < 70$
Tinggi	$70 \leq \text{IPM} < 80$
Sangat Tinggi	$\text{IPM} \geq 80$

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara, 2017

**Gambar 5.6**  
**IPM Kabupaten Samosir dan Provinsi Sumatera Utara**  
**Tahun 2013-2017**



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara, 2017

Pada gambar 5.6 terlihat bahwa selama 5 (lima) tahun terakhir IPM Kabupaten Samosir mengalami kenaikan sebesar 2,63 point dengan rata – rata pertumbuhan sebesar 0,92 persen. Nilai IPM Kabupaten Samosir pada tahun 2017 ini berada pada kriteria sedang, dengan nilai sebesar 69,43. Bila dibandingkan dengan IPM provinsi Sumatera Utara, IPM kabupaten Samosir masih berada di bawah provinsi Sumatera Utara yaitu sebesar 70,53 yang berada pada kriteria tinggi.

**Tabel. 5.2**  
**Komponen IPM dan Status Indeks Pembangunan Manusia**  
**Kabupaten Samosir dan Sumatera Utara**  
**Tahun 2017**

Komponen IPM	Samosir	Sumatera Utara
[1]	[2]	[3]
Umur Harapan Hidup ( <i>tahun</i> )	70,68	68,37
Harapan Lama Sekolah ( <i>tahun</i> )	13,43	13,06
Rata-rata Lama sekolah ( <i>tahun</i> )	8,95	9,25
Daya Beli ( <i>000 Rp</i> )	8 163	10,03
<b>IPM</b>	<b>69,43</b>	<b>70,53</b>
<b>Status</b>	<b>Sedang</b>	<b>Tinggi</b>

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara, 2017

Dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas manusia di Kabupaten Samosir, yang dicerminkan dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdapat beberapa strategi yang mungkin dapat dikembangkan. Strategi tersebut yaitu peningkatan pendapatan perkapita sekaligus penurunan angka kemiskinan dan pengangguran melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Pada bidang pendidikan, strategi yang dapat dikembangkan yaitu peningkatan kualitas pendidikan masyarakat yang didukung oleh pemantapan pelaksanaan pendidikan formal, mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD) sampai wajib belajar 12 tahun. Strategi lainnya yaitu pengembangan lembaga jaminan sosial, peningkatan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, peningkatan kesetaraan gender,

perlindungan anak, penurunan kesenjangan antar daerah serta pengendalian pertumbuhan penduduk yang seimbang.

<https://samosirkab.bps.go.id>



# LAMPIRAN

<https://samosirkab.bpt.go.id>



**Lampiran 6.1**  
**Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk**  
**Menurut Kecamatan**  
**2017**

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa) per km <sup>2</sup>
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1.	Sianjur Mulamula	140,24	9 546	68,07
2.	Harian	560,45	8 195	14,62
3.	Sitotio	50,76	7 408	145,94
4.	Onan Runggu	60,89	10 800	177,37
5.	Nainggolan	87,86	12 392	141,04
6.	Palipi	129,55	16 826	129,88
7.	Ronggur Nihuta	94,87	8 720	91,92
8.	Pangururan	121,43	30 803	253,67
9.	Simanindo	198,20	20 409	102,97
<b>Kabupaten Samosir</b>		<b>1 444,25</b>	<b>125 099</b>	<b>86,62</b>

Sumber : BPS Kabupaten Samosir, 2017

**Lampiran 6.2**  
**Jumlah Penduduk, Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin**  
**Menurut Kecamatan**  
**2017**

No.	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah (jiwa)	Rasio Jenis Kelamin
		Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1.	Sianjur Mulamula	4 820	4 726	9 546	101,99
2.	Harian	4 050	4 145	8 195	97,71
3.	Sitotio	3 699	3 709	7 408	99,73
4.	Onan Runggu	5 333	5 467	10 800	97,55
5.	Nainggolan	6 110	6 282	12 392	97,26
6.	Palipi	8 351	8 475	16 826	98,54
7.	Ronggur Nihuta	4 316	4 404	8 720	98,00
8.	Pangururan	15 397	15 406	30 803	99,94
9.	Simanindo	10 138	10 271	20 409	98,71
<b>Kabupaten Samosir</b>		<b>62 214</b>	<b>62 885</b>	<b>125 099</b>	<b>98,93</b>

Sumber : BPS Kabupaten Samosir, 2017

**Lampiran 6.3**  
**Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin**  
**2017**  
**(jiwa)**

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
[1]	[2]	[3]	[4]
0 – 4	7 202	6 959	14 161
5 – 9	7 781	7 448	15 229
10 – 14	7 750	6 943	14 693
15 – 19	6 512	5 650	12 162
20 - 24	3 693	2 512	6 205
25 - 29	3 628	3 293	6 921
30 – 34	3 674	3 462	7 136
35 - 39	3 477	3 277	6 754
40 – 44	3 383	3 506	6 889
45 – 49	3 231	3 541	6 772
50 – 54	3 025	3 828	6 853
55 – 59	2 946	3 811	6 757
60 – 64	2 461	3 304	5 765
65 – 69	1 677	2 260	3 937
70 – 74	967	1 463	2 430
75 +	807	1 628	2 435
<b>Kabupaten Samosir</b>	<b>62 214</b>	<b>62 885</b>	<b>125 099</b>

Sumber : BPS Kabupaten Samosir, 2017

**Lampiran 6.4**  
**Persentase Penduduk Kabupaten Samosir Berusia 10 Tahun Ke Atas**  
**Menurut Partisipasi Sekolah dan Jenis Kelamin**  
**2017**  
**(persen)**

No.	Status Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1.	Tidak/Belum Pernah Sekolah	<b>0,72</b>	<b>2,67</b>	<b>1,70</b>
2.	Masih Sekolah	<b>28,20</b>	<b>24,91</b>	<b>26,54</b>
	- Tamat SD	10,64	8,92	9,77
	- Tamat SLTP	7,97	9,37	8,68
	- Tamat SLTA	8,88	6,05	7,46
	- Tamat Universitas	0,70	0,57	0,63
3.	Tidak Bersekolah Lagi	<b>71,08</b>	<b>72,41</b>	<b>71,76</b>
<b>Kabupaten Samosir</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS-Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2017

**Lampiran 6.5**  
**Angka Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota**  
**di Propinsi Sumatera Utara**  
**2013-2017 (Tahun)**

No.	Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup				
		2013	2014	2015	2016	2017
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Nias	68,77	68,87	68,97	69,07	69,18
2.	Mandailing Natal	61,08	61,18	61,58	61,77	61,97
3.	Tapanuli Selatan	63,04	63,14	63,74	64,01	64,28
4.	Tapanuli Tengah	66,47	66,49	66,59	66,62	66,66
5.	Tapanuli Utara	67,15	67,25	67,55	67,71	67,86
6.	Toba Samosir	68,94	69,04	69,14	69,25	69,36
7.	LabuhanBatu	69,24	69,26	69,36	69,40	69,44
8.	Asahan	67,17	67,27	67,37	67,47	67,57
9.	Simalungun	70,14	70,24	70,34	70,43	70,53
10.	Dairi	67,38	67,48	67,78	67,95	68,13
11.	Karo	70,38	70,42	70,62	70,69	70,77
12.	Deli Serdang	70,78	70,80	71,00	71,06	71,11
13.	Langkat	67,23	67,33	67,63	67,79	67,94
14.	Nias Selatan	67,06	67,16	67,66	67,83	68,00
15.	Humbang Hasundutan	67,70	67,80	68,10	68,26	68,41
16.	Pakpak Barat	64,42	64,45	64,85	64,95	65,05
17.	<b>Samosir</b>	<b>69,56</b>	<b>69,66</b>	<b>70,26</b>	<b>70,47</b>	<b>70,68</b>
18.	Serdang Bedagai	67,17	67,27	67,47	67,63	67,79
19.	Batu Bara	65,40	65,50	65,80	65,95	66,10
20.	Padang Lawas Utara	66,38	66,40	66,50	66,54	66,58
21.	Padang Lawas	65,97	66,01	66,31	66,40	66,50
22.	Labuhan Batu Selatan	68,03	68,06	68,09	68,11	68,14
23.	Labuhan Batu Utara	68,40	68,50	68,70	68,80	68,91
24.	Nias Utara	68,39	68,49	68,59	68,68	68,77
25.	Nias Barat	67,54	67,64	67,94	68,10	68,28
26.	Sibolga	67,30	67,40	67,70	67,87	68,05
27.	Tanjung Balai	61,30	61,40	61,90	62,09	62,28
28.	Pematang Siantar	71,59	71,69	72,29	72,46	72,63
29.	TebingTinggi	69,94	70,04	70,14	70,21	70,28
30.	Medan	72,13	72,18	72,28	72,34	72,40
31.	Binjai	71,34	71,39	71,59	71,67	71,75
32.	Padang Sidempuan	68,22	68,27	68,32	68,37	68,41
33.	Gunung Sitoli	70,13	70,19	70,29	70,36	70,42
	<b>Sumatera Utara</b>	<b>67,81</b>	<b>67,94</b>	<b>68,04</b>	<b>68,29</b>	<b>68,37</b>

Sumber : BPS Propinsi Sumatera Utara

**Lampiran 6.6**  
**Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota**  
**di Propinsi Sumatera Utara**  
**2013-2017 (Tahun)**

No.	Kabupaten/Kota	Harapan Lama Sekolah				
		2013	2014	2015	2016	2017
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Nias	11,15	11,45	11,77	12,09	12,12
2.	Mandailing Natal	12,21	12,57	12,77	12,78	12,99
3.	Tapanuli Selatan	12,93	13,04	13,06	13,07	13,08
4.	Tapanuli Tengah	11,89	12,21	12,40	12,45	12,65
5.	Tapanuli Utara	13,09	13,14	13,19	13,61	13,65
6.	Toba Samosir	12,89	13,16	13,18	13,19	13,25
7.	LabuhanBatu	12,17	12,56	12,57	12,58	12,59
8.	Asahan	11,51	12,15	12,49	12,52	12,53
9.	Simalungun	12,57	12,63	12,69	12,70	12,71
10.	Dairi	11,43	12,05	12,80	12,84	13,06
11.	Karo	11,87	11,89	12,22	12,65	12,66
12.	Deli Serdang	11,77	12,11	12,52	12,69	12,9
13.	Langkat	12,21	12,69	12,70	12,71	12,72
14.	Nias Selatan	11,17	11,48	11,96	11,97	11,98
15.	Humbang Hasundutan	12,67	13,13	13,15	13,21	13,24
16.	Pakpak Barat	13,76	13,78	13,80	13,81	13,82
<b>17.</b>	<b>Samosir</b>	<b>12,57</b>	<b>13,39</b>	<b>13,41</b>	<b>13,42</b>	<b>13,43</b>
18.	Serdang Bedagai	11,87	12,29	12,31	12,54	12,55
19.	Batu Bara	11,74	11,94	11,96	12,34	12,49
20.	Padang Lawas Utara	11,62	11,84	11,87	12,30	12,41
21.	Padang Lawas	12,16	12,90	12,91	12,92	12,93
22.	Labuhan Batu Selatan	11,69	11,88	12,73	12,94	12,95
23.	Labuhan Batu Utara	11,30	11,80	12,12	12,54	12,79
24.	Nias Utara	11,76	11,86	12,40	12,41	12,57
25.	Nias Barat	11,77	11,87	12,33	12,60	12,61
26.	Sibolga	12,45	12,76	13,10	13,11	13,12
27.	Tanjung Balai	11,91	12,25	12,40	12,41	12,44
28.	Pematang Siantar	13,36	13,97	13,99	14,00	14,01
29.	Tebing Tinggi	11,90	12,04	12,23	12,65	12,66
30.	Medan	13,65	13,69	13,97	14,06	14,45
31.	Binjai	12,63	13,00	13,56	13,57	13,58
32.	Padang Sidempuan	13,93	13,95	14,48	14,49	14,5
33.	Gunung Sitoli	12,92	13,28	13,65	13,66	13,67
	<b>Sumatera Utara</b>	<b>12,41</b>	<b>12,61</b>	<b>12,82</b>	<b>13,00</b>	<b>13,06</b>

Sumber : BPS Propinsi Sumatera Utara

**Lampiran 6.7**  
**Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS)**  
**Menurut Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Utara**  
**2013-2017 (Tahun)**

No.	Kabupaten/Kota	Rata-rata Lama Sekolah				
		2013	2014	2015	2016	2017
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Nias	4,71	4,75	4,76	4,92	4,93
2.	Mandailing Natal	7,52	7,54	7,63	7,89	8,00
3.	Tapanuli Selatan	8,04	8,22	8,27	8,35	8,67
4.	Tapanuli Tengah	7,50	7,55	8,02	8,03	8,28
5.	Tapanuli Utara	9,04	9,05	9,31	9,32	9,46
6.	Toba Samosir	9,79	9,83	10,08	10,09	10,10
7.	LabuhanBatu	8,60	8,68	8,75	8,78	9,01
8.	Asahan	7,89	7,98	8,32	8,33	8,46
9.	Simalungun	8,37	8,70	8,80	8,86	8,95
10.	Dairi	8,58	8,59	8,69	8,70	8,90
11.	Karo	9,25	9,33	9,50	9,51	9,52
12.	Deli Serdang	9,37	9,46	9,48	9,68	9,70
13.	Langkat	7,69	7,85	7,92	8,18	8,51
14.	Nias Selatan	4,28	4,64	4,64	4,65	4,95
15.	Humbang Hasundutan	8,80	8,88	8,90	8,91	9,10
16.	Pakpak Barat	8,25	8,39	8,45	8,46	8,47
17.	<b>Samosir</b>	<b>8,52</b>	<b>8,57</b>	<b>8,84</b>	<b>8,94</b>	8,95
18.	Serdang Bedagai	8,02	8,04	8,08	8,34	8,35
19.	Batu Bara	7,70	7,72	7,74	7,75	7,83
20.	Padang Lawas Utara	8,41	8,44	8,91	8,92	8,93
21.	Padang Lawas	8,14	8,16	8,40	8,41	8,42
22.	Labuhan Batu Selatan	8,25	8,67	8,68	8,69	8,70
23.	Labuhan Batu Utara	8,10	8,27	8,31	8,33	8,34
24.	Nias Utara	5,55	6,05	6,06	6,07	6,08
25.	Nias Barat	5,25	5,73	5,74	5,77	5,78
26.	Sibolga	9,73	9,83	9,85	9,86	9,87
27.	Tanjung Balai	8,90	9,03	9,12	9,13	9,14
28.	Pematang Siantar	10,62	10,70	10,73	10,75	11,06
29..	TebingTinggi	10,04	10,05	10,06	10,07	10,09
30.	Medan	10,76	10,88	11,00	11,18	11,25
31.	Binjai	9,75	9,77	10,28	10,28	10,58
32.	Padang Sidempuan	10,10	10,13	10,47	10,48	10,56
33.	Gunung Sitoli	8,16	8,17	8,18	8,20	8,56
	<b>Sumatera Utara</b>	<b>8,79</b>	<b>8,93</b>	<b>9,03</b>	<b>9,12</b>	<b>9,25</b>

Sumber : BPS Propinsi Sumatera Utara

**Lampiran 6.8**  
**Pengeluaran Riil Per Kapita Yang Disesuaikan Menurut Kabupaten/Kota**  
**di Propinsi Sumatera Utara**  
**2013-2017**

No.	Kabupaten/Kota	Pengeluaran Riil Per Kapita( Rp.000)				
		2013	2014	2015	2016	2017
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Nias	5 914	5 980	6 234	6 409	6 629
2.	Mandailing Natal	8 960	9 040	9 096	9 237	9 371
3.	Tapanuli Selatan	10 504	10 593	10 623	10 821	10 951
4.	Tapanuli Tengah	9 382	9 489	9 555	9 694	9 852
5.	Tapanuli Utara	10 850	10 964	11 079	11 242	11 407
6.	Toba Samosir	11 178	11 250	11 535	11 687	11 846
7.	LabuhanBatu	10 210	10 325	10 356	10 559	10 698
8.	Asahan	9 895	9 988	10 067	10 288	10 477
9.	Simalungun	10 494	10 597	10 728	10 855	10 988
10.	Dairi	9 580	9 642	9 708	10 190	10 395
11.	Karo	11 453	11 548	11 800	11 925	12 055
12.	Deli Serdang	10 924	11 065	11 359	11 683	11 891
13.	Langkat	9 970	10 062	10 364	10 5`67	10 784
14.	Nias Selatan	6 266	6 329	6 454	6 647	6 792
15.	Humbang Hasundutan	6 670	6 736	6 889	7 135	7 412
16.	Pakpak Barat	7 269	7 364	7 496	7 641	7 913
<b>17.</b>	<b>Samosir</b>	<b>7 600</b>	<b>7 667</b>	<b>7 698</b>	<b>7 813</b>	<b>8 163</b>
18.	Serdang Bedagai	9 882	10 042	10 110	10 246	10 551
19.	Batu Bara	9 218	9 370	9 692	9 886	10 084
20.	Padang Lawas Utara	9 076	9 171	9 363	9 600	9 737
21.	Padang Lawas	7 825	7 910	7 955	8 094	8 445
22.	Labuhan Batu Selatan	10 040	10 111	10 319	10 712	10 892
23.	Labuhan Batu Utara	11 063	11 147	11 201	11 278	11 510
24.	Nias Utara	5 523	5 580	5 627	5 770	5 835
25.	Nias Barat	5 061	5 156	5 207	5 391	5 594
26.	Sibolga	10 525	10 623	10 765	11 034	11 140
27.	Tanjung Balai	10 001	10 133	10 326	10 577	10 746
28.	Pematang Siantar	11 139	11 204	11 388	11 878	12 106
29.	TebingTinggi	10 829	10 918	11 393	11 747	12 055
30.	Medan	13 902	13 984	14 191	14 393	14 605
31.	Binjai	9 943	10 058	10 098	10 342	10 470
32.	Padang Sidempuan	9 518	9 623	9 668	10 198	10 464
33.	Gunung Sitoli	6 524	6 685	6 742	6 963	7 300
<b>Sumatera Utara</b>		<b>9 309</b>	<b>9 391</b>	<b>9 563</b>	<b>9 744</b>	<b>10 036</b>

Sumber : BPS Propinsi Sumatera Utara

**Lampiran 6.9**  
**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota**  
**Di Propinsi Sumatera Utara**  
**2013-2017**

No.	Kabupaten /Kota	IPM				
		2013	2014	2015	2016	2017
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	N i a s	57,43	57,98	58,85	59,75	60,21
2.	Mandailing Natal	62,91	63,42	63,99	64,55	65,12
3.	Tapanuli Selatan	66,75	67,22	67,63	68,04	68,68
4.	Tapanuli Tengah	65,64	66,16	67,06	67,27	67,96
5.	Tapanuli Utara	70,50	70,70	71,32	71,96	72,38
6.	Toba Samosir	72,36	72,79	73,40	73,61	73,87
7.	LabuhanBatu	69,45	70,06	70,23	70,50	70,94
8.	A s a h a n	66,58	67,51	68,40	68,71	69,1
9.	Simalungun	70,28	70,89	71,24	71,48	71,77
10.	D a i r i	67,15	67,91	69,00	69,61	70,36
11.	K a r o	71,62	71,84	72,69	73,29	73,45
12.	Deli Serdang	71,39	71,98	72,79	73,51	73,94
13.	Langkat	67,17	68,00	68,53	69,13	69,82
14.	Nias Selatan	56,78	57,78	58,74	59,14	59,85
15.	Humbang Hasundutan	64,92	65,59	66,03	66,56	67,3
16.	Pakpak Barat	64,73	65,06	65,53	65,81	66,25
17.	<b>Samosir</b>	<b>66,80</b>	<b>67,80</b>	<b>68,43</b>	<b>68,82</b>	69,43
18.	Serdang Bedagai	67,11	67,78	68,01	68,77	69,16
19.	Batu Bara	65,06	65,50	66,02	66,69	67,2
20.	Padang Lawas Utara	66,13	66,50	67,35	68,05	68,34
21.	Padang Lawas	64,62	65,50	65,99	66,23	66,75
22.	Labuhan Batu Selatan	67,78	68,59	69,67	70,28	70,48
23.	Labuhan Batu Utara	68,28	69,15	69,69	70,26	70,79
24.	Nias Utara	58,29	59,18	59,88	60,23	60,57
25.	Nias Barat	56,58	57,54	58,25	59,03	59,56
26.	Sibolga	70,45	71,01	71,64	72,00	72,2
27.	Tanjung Balai	65,40	66,05	66,74	67,09	67,38
28.	Pematang Siantar	75,05	75,83	76,34	76,90	77,54
29.	TebingTinggi	71,85	72,13	72,81	73,58	73,9
30.	M e d a n	78,00	78,26	78,87	79,34	79,97
31.	B i n j a i	72,02	72,55	73,81	74,11	74,63
32.	Padang Sidempuan	71,68	71,88	72,80	73,42	73,81
33.	Gunung Sitoli	65,25	65,91	66,41	66,85	67,84
<b>Sumatera Utara</b>		<b>68,36</b>	<b>68,87</b>	<b>69,51</b>	<b>70,00</b>	<b>70,53</b>

Sumber : BPS Propinsi Sumatera Utara

**Lampiran 6.10**  
**Peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota**  
**di Sumatera Utara secara Nasional dan Propinsi Sumatera Utara**  
**2013-2017**

No.	Kabupaten /Kota	Prop. Sumut				
		2013	2014	2015	2016	2017
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Nias	31	31	31	31	31
2.	Mandailing Natal	29	29	29	29	29
3.	Tapanuli Selatan	19	20	20	21	20
4.	Tapanuli Tengah	22	22	22	22	22
5.	Tapanuli Utara	9	11	10	10	9
6.	Toba Samosir	3	3	4	4	6
7.	LabuhanBatu	12	12	12	12	12
8.	Asahan	20	19	18	19	19
9.	Simalungun	11	10	11	11	11
10.	Dairi	16	16	15	15	15
11.	Karo	7	8	8	8	8
12.	Deli Serdang	8	6	7	6	4
13.	Langkat	15	15	16	16	16
14.	Nias Selatan	32	32	32	32	32
15.	Humbang Hasundutan	26	25	25	26	25
16.	Pakpak Barat	27	28	28	28	28
<b>17.</b>	<b>Samosir</b>	<b>18</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>
18.	Serdang Bedagai	17	18	19	18	18
19.	Batu Bara	25	26	26	25	26
20.	Padang Lawas Utara	21	21	21	20	21
21.	Padang Lawas	28	27	27	27	27
22.	Labuhan Batu Selatan	14	14	14	13	14
23.	Labuhan Batu Utara	13	13	13	14	13
24.	Nias Utara	30	30	30	30	30
25.	Nias Barat	33	33	33	33	33
26.	Sibolga	10	9	9	9	10
27.	Tanjung Balai	23	23	23	23	24
28.	Pematang Siantar	2	2	2	2	2
29.	TebingTinggi	5	5	5	5	5
30.	Medan	1	1	1	1	1
31.	Binjai	4	4	3	3	3
32.	Padang Sidempuan	6	7	6	7	7
33.	Gunung Sitoli	24	24	24	24	23
<b>Sumatera Utara</b>		<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>11</b>

Sumber : BPS Propinsi Sumatera Utara

# DATA

## MENCERDASKAN BANGSA

<https://samosirkab.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN SAMOSIR**

Komplek Perkantoran Kabupaten Samsir Blok A  
Desa Siopat Sosor Parbaba Pangururan 22392  
Telp : 0626 - 2222490 Fax : 0626 - 2222491  
Email : [bps1217@bps.go.id](mailto:bps1217@bps.go.id)  
Website : [samosirkab.bps.go.id](http://samosirkab.bps.go.id)

